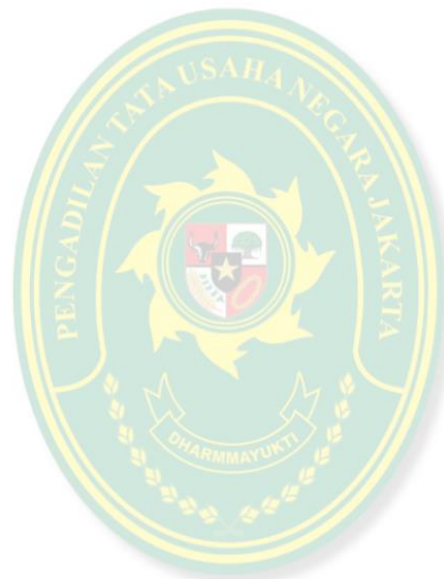


PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2023



Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang,
Jakarta Timur. 13950 email:
ptun.jakarta@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kepada Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehingga dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023.

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan *accountability* untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan efektif maka setiap kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan. Laporan ini dibuat berdasarkan surat Plt Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 4108/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023 ini merupakan laporan sebagai bentuk pertanggung jawaban dan diharapkan juga merupakan bahan evaluasi serta perencanaan untuk penyusunan program kerja selanjutnya untuk lebih baik lagi agar dapat mewujudkan visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sudah ditetapkan yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Agung”**.

Semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini dapat bermanfaat. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas dan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Jakarta, 15 Januari 2024

Ketua,



Oenoen Pratiwi, SH, MH
Nip. 197210261992032001

OUTLINE LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	4
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	4
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	4
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	4
4. Keadaan Perkara Tingkat PK	4
B. PENYELESAIAN PERKARA	5
1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus	5
2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu	5
3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK.	13
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (Sertifikasi ISO Pengadilan)	16
1. POSBAKUM	16
2. Perkara Prodeo	17
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	17
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/Golongan/ Pendidikan	
1. Mutasi	26
2. Promosi	30
3. Pensiun	31
4. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	31
BAB IV PENGELOLA KEUANGAN, SARANA PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	39
1. Pengelolaan Keuangan	39
2. Pengelolaan Saran dan Prasarana	40
3. Pengelolaan Teknologi Informasi	53
- Implementasi E Court	53
- Implementasi SIPP	55

BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	56
	1. Akreditasi Penjaminan Mutu	56
	2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	63
	3. Inovasi Pelayanan Publik	71
BAB VI	PENGAWASAN	79
	A. Internal	79
	B. Evaluasi	83
BAB VII	PENUTUP	84
	A. Kesimpulan	84
	B. Rekomendasi	86

BAB I PENDAHULUAN

Kebijakan Umum Peradilan

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI, Sebagai salah satu institusi negara / pemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2023.

Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Sebagaimana halnya Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan Tertinggi dan PTUN dalam struktur organisasi berada di bawah naungan Mahkamah Agung, maka PTUN Jakarta memiliki **visi** dan **misi** yang sama dengan organisasi induknya, yaitu:

***“MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
YANG AGUNG”***

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan, dan Modern;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana Strategis

Perencanaan strategis dapat diartikan sebagai suatu pengarahan serta pemikiran untuk mencapai visi dan misi. Pengadilan TUN Jakarta melalui kebijakan yang dibuat oleh unsur pimpinan (Ketua/Wakil Ketua/Para Hakim dan Panitera / Sekretaris) beserta jajarannya kebawah telah menyusun rencana strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini antara lain :
 - a. Persentase perkara yang diselesaikan ;
 - b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi ;
 - c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini antara lain :
 - Persentase salinan Putusan Yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
 - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
 - b. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
Indikator / Kinerja yang mendukung sasaran ini adalah :
 - Persentase Putusan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang ditindak lanjuti.

Dari rencana strategis tersebut, diharapkan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas teknis yudisial maupun non yudisial dapat dilakukan dengan baik serta dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), sehingga hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan dapat diminimalisir. Terlebih lagi dengan dibentuknya Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) dapat memperkokoh pelaksanaan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara di Pengadilan TUN Jakarta

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pada akhir tahun 2022 PTUN Jakarta mempunyai sisa perkara sebanyak **169** Perkara dan pada tahun 2023, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerima perkara masuk **671** Perkara, perkara yang dicabut 123 perkara, perkara yang di putus 511 perkara, Dismissal 19 perkara, Perlawanan 7 perkara, dan sisa perkara 194 perkara.

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Sisa Perkara Banding pada tahun 2022 sebanyak **70** Perkara, dan pada tahun 2023 PTUN Jakarta menerima perkara banding yang sebanyak **406** Perkara, perkara banding dicabut **9** perkara, perkara yang diputus **234** Perkara, sisa perkara banding **233** perkara.

- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Sisa Perkara Kasasi pada tahun 2022 sebanyak **88** perkara pada tahun 2023 PTUN Jakarta menerima perkara Kasasi masuk sebanyak 156 perkara, perkara Putus **119** perkara, sisa perkara **125** perkara.

- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK)

Jumlah Perkara Kasasi di Tahun 2023 sejumlah **244** Perkara, dikurangi Perkara Permohonan PK sebanyak **43** Perkara, jadi perkara yang tidak mengajukan hukum PK sebanyak **201** Perkara.

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus

NO.	Jenis Perkara	Sisa Perkara
A	GUGATAN	
1	Pertanahan	21
2	Kepegawaian	5
3	Perijinan	34
4	Lingkungan Hidup	0
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	0
6	Badan Hukum/ Parpol	14
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	0
8	Kepala Daerah	0
9	Proses Pemilihan Umum	0
10	Penggantian Antar Waktu	0
11	Ketenagakerjaan	0
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	2
13	Pengadaan Tanah	0
14	Fiktif Positif	0
15	Penyalahgunaan Wewenang	0
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	56
17	Merek	1
18	Lain Lain	61
	JUMLAH	194

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2023 terdapat **843** Perkara, sisa dari jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak **194** Perkara. Rincian dari jenis sisa perkara adalah sebagai berikut :

2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu

Dari perkara-perkara yang telah diselesaikan selama tahun 2023 sebanyak **653** Perkara, Perkara yang Putus Kurang dari 3 (Tiga) Bulan sejumlah **228** Perkara, Perkara yang putus 3 (Tiga) sampai dengan 5 (Lima) bulan sejumlah **306** Perkara, dan Perkara putus 5 (Lima) sampai dengan 12 (Dua Belas) Bulan sejumlah **119** Perkara.

NO	PERKARA PUTUS TAHUN 2023		
	KURANG DARI 3 BULAN	3 - 5 BULAN	5 - 12 BULAN
1.	475/G/2022/PTUN-JKT	257/G/2022/PTUN-JKT	248/G/2022/PTUN.JKT
2.	455/G/SPPU/2022/PTUN-JKT	286/G/2022/PTUN-JKT	249/G/2022/PTUN.JKT
3.	456/G/SPPU/2022/PTUN-JKT	336/G/2022/PTUN-JKT	253/G/2022/PTUN.JKT
4.	476/G/2022/PTUN-JKT	349/G/2022/PTUN-JKT	192/G/2022/PTUN.JKT
5.	463/G/SPPU/2022/PTUN-JKT	285/G/2022/PTUN-JKT	193/G/2022/PTUN.JKT
6.	423/PLW/2022/PTUN-JKT	308/G/2022/PTUN-JKT	237/G/2022/PTUN-JKT
7.	429/G/TF/2022/PTUN-JKT	374/G/TF/2022/PTUN-JKT	238/G/2022/PTUN.JKT
8.	464/G/SPPU/2022/PTUN-JKT	375/G/TF/2022/PTUN-JKT	226/G/2022/PTUN.JKT
9.	468/G/SPPU/2022/PTUN-JKT	316/G/TF/2022/PTUN-JKT	227/G/2022/PTUN.JKT
10.	621/PLW/2022/PTUN-JKT	274/G/TF/2022/PTUN-JKT	271/G/2022/PTUN.JKT
11.	430/G/TF/2022/PTUN-JKT	352/G/TF/2022/PTUN-JKT	224/G/2022/PTUN.JKT
12.	172/G/2022/PTUN-JKT	346/G/TF/2022/PTN-JKT	225/G/2022/PTUN.JKT
13.	431/G/TF/2022/PTUN-JKT	282/G/2022/PTUN-JKT	263/G/2022/PTUN.JKT
14.	5/G/SPPU/2023/PTUN-JKT	321/G/2022/PTUN-JKT	272/G/2022/PTUN.JKT
15.	18/G/2023/PTUN-JKT	339/G/2022/PTUN-JKT	297/G/2022/PTUN.JKT
16.	4/G/SPPU/2023/PTUN-JKT	417/G/TF/2022/PTUN-JKT	280/G/2022/PTUN.JKT
17.	25/G/SPPU/2023/PTUN-JKT	301/G/TF/2022/PTUN-JKT	307/G/2022/PTUN.JKT
18.	13/G/2023/PTUN-JKT	376/G/TF/2022/PTUN-JKT	330/G/TF/2022/PTUN.JKT
19.	33/G/2023/PTUN-JKT	377/G/TF/2022/PTUN-JKT	331/G/TF/2023/PTUN.JKT
20.	460/G/TF/2022/PTN-JKT	289/G/2022/PTUN-JKT	334/G/2022/PTUN.JKT
21.	491/G/TF/2022/PTN-JKT	302/G/2022/PTUN-JKT	351/G/2022/PTUN.JKT
22.	41/G/2023/PTUN-JKT	306/G/2022/PTUN-JKT	398/G/2022/PTUN.JKT
23.	448/G/TF/2022/PTUN-JKT	305/G/2022/PTUN-JKT	353/G/2022/PTUN.JKT
24.	449/G/TF//2022/PTUN-JKT	320/G/2022/PTUN-JKT	304/G/2022/PTUN.JKT
25.	49/G/2023/PTUN-JKT	388/G/2022/PTUN-JKT	342/G/2022/PTUN.JKT
26.	355/G/2023/PTUN-JKT	366/G/TF/2022/PTUN-JKT	348/G/2022/PTUN.JKT
27.	19/PLW/2022/PTUN-JKT	385/G/2022/PTUN-JKT	347/G/2022/PTUN.JKT
28.	37/G/2023/PTUN-JKT	386/G/2022/PTUN-JKT	364/G/2022/PTUN.JKT
29.	40/G/2023/PTUN-JKT	300/G/2022/PTUN-JKT	371/G/2022/PTUN.JKT
30.	433/G/TF/2022/PTUN-JKT	350/G/2022/PTUN-JKT	369/G/TF/2022/PTUN.JKT
31.	435/G/TF//2022/PTUN-JKT	351/G/2022/PTUN-JKT	264/G/2022/PTUN.JKT
32.	64/G/2023/PTUN-JKT	296/G/2022/PTN-JKT	335/G/2022/PTUN.JKT
33.	457/G/TF/2022/PTUN-JKT	356/G/2022/PTN-JKT	367/G/2022/PTUN.JKT
34.	445/G/TF/2022/PTUN-JKT	244/G/2022/PTUN-JKT	324/G/2022/PTUN.JKT
35.	446/G/TF/2022/PTUN-JKT	333/G/TF/2022/PTUN-JKT	325/G/2022/PTUN.JKT
36.	447/G/TF/2022/PTUN-JKT	334/G/TF/2022/PTUN-JKT	326/G/2022/PTUN.JKT
37.	33/PLW/2023/PTUN-JKT	368/G/2022/PTUN-JKT	360/G/2022/PTUN.JKT
38.	50/G/TF/2023/PTUN-JKT	338/G/2022/PTUN-JKT	361/G/2022/PTUN.JKT
39.	51/G/TF/2023/PTUN-JKT	397/G/TF/2022/PTUN-JKT	362/G/2022/PTUN.JKT

40.	56/G/2023/PTUN-JKT	357/G/2022/PTUN-JKT	383/G/2022/PTUN.JKT
41.	86/G/2023/PTN-JKT	372/G/TF/2022/PTUN-JKT	275/G/2022/PTUN.JKT
42.	54/G/2023/PTN-JKT	382/G/2022/PTUN-JKT	384/G/2022/PTUN.JKT
43.	61/G/2023/PTUN-JKT	392/G/TF//2022/PTUN-JKT	398/G/2022/PTUN.JKT
44.	90/G/2023/PTUN-JKT	427/G/TF/2022/PTUN-JKT	387/G/2022/PTUN.JKT
45.	49/G/TF/2023/PTUN-JKT	378/G/2022/PTUN-JKT	390/G/2022/PTUN.JKT
46.	63/G/TF/2023/PTUN-JKT	379/G/TF/2022/PTUN-JKT	426/G/2022/PTUN.JKT
47.	138/G/2023/PTUN-JKT	408/G/2022/PTUN-JKT	404/G/2022/PTUN.JKT
48.	142/G/2023/PTUN-JKT	462/G/TF/2022/PTUN-JKT	427/G/2022/PTUN.JKT
49.	16/G/2023/PTUN-JKT	470/G/TF/2022/PTUN-JKT	424/G/TF/2022/PTUN.JKT
50.	60/G/2023/PTUN-JKT	471/G/TF/2022/PTUN-JKT	434/G/2022/PTUN.JKT
51.	144/G/2023/PTUN-JKT	405/G/2022/PTUN-JKT	443/G/2022/PTUN.JKT
52.	93/G/TF//2023/PTUN-JKT	406/G/2022/PTUN-JKT	422/G/TF/2022/PTUN.JKT
53.	101/G/TF/2023/PTUN-JKT	409/G/2022/PTUN-JKT	401/G/2022/PTUN.JKT
54.	30/G/2023/PTUN-JKT	410/G/TF/2022/PTN-JKT	436/G/2022/PTUN.JKT
55.	88/G/TF/2023/PTUN-JKT	420/G/2022/PTUN-JKT	474/G/2022/PTUN.JKT
56.	163/G/2023/PTUN-JKT	465/G/TF/2022/PTUN-JKT	437/G/2022/PTUN.JKT
57.	164/G/2023/PTUN-JKT	381/G/TF/2022/PTUN-JKT	432/G/TF/2022/PTUN.JKT
58.	53/G/TF/2023/PTUN-JKT	403/G/2022/PTUN-JKT	466/G/2022/PTUN.JKT
59.	64/G/TF/2023/PTUN-JKT	418/G/2022/PTUN-JKT	458/G/2022/PTUN.JKT
60.	157/G/2023/PTUN-JKT	438/G/2022/PTUN-JKT	24/G/2023/PTUN.JKT
61.	174/G/2023/PTUN-JKT	411/G/2022/PTUN-JKT	461/G/2022/PTUN.JKT
62.	181/G/SPPU/2023/PTN-JKT	428/G/2022/PTUN-JKT	440/G/TF/2022/PTUN.JKT
63.	141/G/2023/PTN-JKT	473/G/2022/PTUN-JKT	20/G/2023/PTUN.JKT
64.	214/G/TF/2023/PTUN-JKT	467/G/TF//2022/PTUN-JKT	21/G/2023/PTUN.JKT
65.	206/G/2023/PTUN-JKT	396/G/2022/PTUN-JKT	15/G/2023/PTUN.JKT
66.	208/G/2023/PTUN-JKT	395/G/2022/PTUN-JKT	441/G/2022/PTUN.JKT
67.	232/G/2023/PTUN-JKT	394/G/2022/PTUN-JKT	442/G/2022/PTUN.JKT
68.	188/G/TF/2023/PTUN-JKT	413/G/2022/PTUN-JKT	3/G/2023/PTUN.JKT
69.	189/G/TF/2023/PTUN-JKT	414/G/2022/PTUN-JKT	48/G/2023/PTUN.JKT
70.	191/G/TF/2023/PTUN-JKT	450/G/2022/PTUN-JKT	59/G/LH/2023/PTUN.JKT
71.	151/G/2023/PTUN-JKT	415/G/2022/PTUN-JKT	52/G/2023/PTUN.JKT
72.	98/G/TF/2023/PTUN-JKT	12/G/2023/PTUN-JKT	42/G/2023/PTUN.JKT
73.	114/G/TF//2023/PTUN-JKT	27/G/2023/PTUN-JKT	469/G/2022/PTUN.JKT
74.	146/G/TF/2023/PTUN-JKT	23/G/2023/PTUN-JKT	66/G/2023/PTUN.JKT
75.	153/G/TF/2023/PTUN-JKT	444/G/TF/2022/PTN-JKT	77/G/2023/PTUN.JKT
76.	245/G/2023/PTUN-JKT	7/G/TF/2023/PTN-JKT	71/G/2023/PTUN.JKT
77.	102/G/TF/2023/PTUN-JKT	9/G/TF/2023/PTN-JKT	107/G/2023/PTUN.JKT
78.	103/G/TF/2023/PTUN-JKT	10/G/TF/2023/PTN-JKT	89/G/2023/PTUN.JKT
79.	249/G/2023/PTUN-JKT	11/G/TF/2023/PTN-JKT	82/G/2023/PTUN.JKT
80.	137/G/2023/PTUN-JKT	31/G/TF/2023/PTN-JKT	87/G/2023/PTUN.JKT
81.	279/G/TF/2023/PTUN-JKT	32/G/TF/2023/PTN-JKT	136/G/TF/2022/PTUN.JKT
82.	280/G/TF/2023/PTUN-JKT	452/G/2022/PTUN-JKT	85/G/2023/PTUN.JKT

83	263/G/2023/PTUN-JKT	472/G/TF/2022/PTUN-JKT	156/G/2023/PTUN.JKT
84	282/G/TF/2023/PTN-JKT	453/G/TF/2022/PTUN-JKT	109/G/2023/PTUN.JKT
85	283/G/TF/2023/PTN-JKT	454/G/TF/2022/PTUN-JKT	158/G/TF/2023/PTUN.JKT
86	208/PLW/2023/PTN-JKT	1/G/2023/PTUN-JKT	39/G/2023/PTUN.JKT
87	203/G/TF/2023/PTN-JKT	38/G/TF/2023/PTUN-JKT	84/G/2023/PTUN.JKT
88	203/G/TF/2023/PTN-JKT	459/G/TF/2022/PTUN-JKT	178/G/2023/PTUN.JKT
89	176/G/TF/2023/PTN-JKT	22/G/2023/PTUN-JKT	166/G/2023/PTUN.JKT
90	218/G/TF/2023/PTN-JKT	451/G/2022/PTUN-JKT	180/G/2023/PTUN.JKT
91	236/G/2023/PTUN-JKT	477/G/2022/PTN-JKT	198/G/2023/PTUN.JKT
92	195/G/TF/2022/PTUN-JKT	35/G/2023/PTN-JKT	173/G/2023/PTUN.JKT
93	197/G/TF/2022/PTUN-JKT	17/G/2023/PTUN-JKT	204/G/2023/PTUN.JKT
94	306/G/TF/2022/PTUN-JKT	14/G/2023/PTUN-JKT	233/G/2023/PTUN.JKT
95	220/G/TF/2022/PTUN-JKT	70/G/TF/2023/PTUN-JKT	234/G/2023/PTUN.JKT
96	221/G/TF/2023/PTUN-JKT	26/G/2023/PTUN-JKT	235/G/2023/PTUN.JKT
97	265/G/2023/PTUN-JKT	29/G/2023/PTUN-JKT	201/G/2023/PTUN.JKT
98	208/PLW/2023/PTUN-JKT	47/G/KI/2023/PTUN-JKT	244/G/TF/2023/PTUN.JKT
99	293/G/2023/PTUN-JKT	2/G/2023/PTUN-JKT	219/G/2023/PTUN.JKT
100	182/G/TF/2023/PTN-JKT	8/G/TF/2023/PTUN-JKT	244/G/TF/2022/PTUN.JKT
101	192/G/TF/2023/PTN-JKT	6/G/TF/2023/PTUN-JKT	253/G/TF/2022/PTUN.JKT
102	193/G/TF/2023/PTUN-JKT	36/G//2023/PTUN-JKT	259/G/2023/PTUN.JKT
103	194/G/TF/2023/PTUN-JKT	34/G/2023/PTUN-JKT	275/G/2023/PTUN.JKT
104	316/G/TF/2023/PTUN-JKT	67/G/2023/PTUN-JKT	256/G/2023/PTUN.JKT
105	314/G/TF/2023/PTUN-JKT	28/G/2023/PTUN-JKT	274/G/TF/2023/PTUN.JKT
106	296/G/TF/2023/PTUN-JKT	45/G/2023/PTUN-JKT	228/G/2023/PTUN.JKT
107	337/G/TF/2023/PTUN-JKT	105/G/TF/2023/PTUN-JKT	427/G/2022/PTUN.JKT
108	246/G/TF/2023/PTUN-JKT	113/G/TF/2023/PTUN-JKT	424/G/TF/2022/PTUN.JKT
109	339/G/2023/PTUN-JKT	116/G/TF/2023/PTUN-JKT	434/G/2022/PTUN.JKT
110	249/G/PLW/2023/PTUN-JKT	117/G/TF/2023/PTUN-JKT	443/G/2022/PTUN.JKT
111	338/G/TF//2023/PTUN-JKT	118/G/TF/2023/PTUN-JKT	422/G/TF/2022/PTUN.JKT
112	300/G/2023/PTUN-JKT	121/G/TF/2023/PTN-JKT	401/G/2022/PTUN.JKT
113	361/G/2023/PTUN-JKT	43/G/2023/PTN-JKT	436/G/2022/PTUN.JKT
114	276/G/2023/PTUN-JKT	44/G/2023/PTUN-JKT	474/G/2022/PTUN.JKT
115	309/G/TF/2023/PTUN-JKT	62/G/2023/PTUN-JKT	437/G/2022/PTUN.JKT
116	372/G/TF/2023/PTUN-JKT	122/G/TF/2023/PTUN-JKT	432/G/TF/2022/PTUN.JKT
117	406/G/2023/PTUN-JKT	123/G/TF/2023/PTUN-JKT	466/G/2022/PTUN.JKT
118	340/G/2023/PTUN-JKT	127/G/TF/2023/PTUN-JKT	458/G/2022/PTUN.JKT
119	303/G/TF/2023/PTUN-JKT	128/G/TF/2023/PTUN-JKT	289/G/2022/PTUN.JKT
120	315/G/TF/2023/PTUN-JKT	143/G/TF/2023/PTUN-JKT	
121	441/G/2023/PTN-JKT	115/G/TF/2023/PTUN-JKT	
122	442/G/2023/PTN-JKT	120/G/TF/2023/PTUN-JKT	
123	292/G/2023/PTUN-JKT	132/G/TF//2023/PTUN-JKT	
124	281/G/KI/2023/PTUN-JKT	133/G/TF/2023/PTUN-JKT	
125	379/G/TF/2023/PTUN-JKT	134/G/TF/2023/PTUN-JKT	

126	269/G/TF/2023/PTUN-JKT	119/G/TF/2023/PTUN-JKT	
127	336/G/TF/2023/PTUN-JKT	106/G/TF/2023/PTUN-JKT	
128	350/G/TF/2023/PTUN-JKT	126/G/TF/2023/PTUN-JKT	
129	351/G/TF/2023/PTUN-JKT	154/G/TF/2023/PTUN-JKT	
130	383/G/TF/2023/PTUN-JKT	155/G/TF/2023/PTUN-JKT	
131	285/G/TF/2023/PTUN-JKT	80/G/2023/PTUN-JKT	
132	287/G/TF//2023/PTUN-JKT	135/G/2023/PTUN-JKT	
133	288/G/TF/2023/PTUN-JKT	55/G/TF/2023/PTUN-JKT	
134	302/G/2023/PTUN-JKT	57/G/TF/2023/PTN-JKT	
135	322/G/TF/2023/PTUN-JKT	100/G/2023/PTN-JKT	
136	333/G/TF/2023/PTUN-JKT	131/G/TF/2023/PTN-JKT	
137	356/G/TF/2023/PTUN-JKT	159/G/TF/2023/PTN-JKT	
138	327/G/TF/2023/PTUN-JKT	160/G/TF/2023/PTN-JKT	
139	370/G/TF/2023/PTUN-JKT	161/G/TF/2023/PTN-JKT	
140	432/G/2023/PTUN-JKT	58/G/2023/PTN-JKT	
141	345/G/2023/PTUN-JKT	69/G/2023/PTUN-JKT	
142	307/G/TF/2023/PTUN-JKT	72/G/TF/2023/PTUN-JKT	
143	325/G/TF/2023/PTN-JKT	73/G/TF/2023/PTUN-JKT	
144	463/G/TF/2023/PTN-JKT	78/G/TF/2023/PTUN-JKT	
145	312/G/TF/2023/PTN-JKT	96/G/TF/2023/PTUN-JKT	
146	313/G/TF/2023/PTN-JKT	99/G/TF/2023/PTUN-JKT	
147	468/G/TF/2023/PTN-JKT	124/G/TF/2023/PTUN-JKT	
148	323/G/TF/2023/PTN-JKT	129/G/TF/2023/PTUN-JKT	
149	317/G/TF/2023/PTN-JKT	175/G/TF/2023/PTUN-JKT	
150	329/G/TF/2023/PTUN-JKT	104/G/TF/2023/PTUN-JKT	
151	330/G/TF//2023/PTUN-JKT	172/G/TF/2023/PTUN-JKT	
152	332/G/TF/2023/PTUN-JKT	75/G/TF/2023/PTN-JKT	
153	343/G/TF/2023/PTUN-JKT	94/G/TF/2023/PTN-JKT	
154	444/G/2023/PTUN-JKT	110/G/TF/2023/PTUN-JKT	
155	526/G/2023/PTUN-JKT	111/G/TF/2023/PTUN-JKT	
156	422/G/TF/2023/PTUN-JKT	112/G/TF/2023/PTUN-JKT	
157	431/G/TF/2023/PTUN-JKT	140/G/2023/PTUN-JKT	
158	349/G/TF/2023/PTUN-JKT	95/G/TF/2023/PTUN-JKT	
159	353/G/TF/2023/PTUN-JKT	97/G/TF/2023/PTUN-JKT	
160	357/G/TF/2023/PTUN-JKT	125/G/TF/2023/PTUN-JKT	
161	464/G/2023/PTN-JKT	79/G/2023/PTUN-JKT	
162	506/G/2023/PTN-JKT	81/G/2023/PTUN-JKT	
163	496/G/2023/PTUN-JKT	68/G/TF//2023/PTUN-JKT	
164	500/G/2023/PTUN-JKT	108/G/TF/2023/PTUN-JKT	
165	512/G/2023/PTUN-JKT	196/G/TF/2023/PTUN-JKT	
166	363/G/2023/PTUN-JKT	179/G/2023/PTUN-JKT	
167	476/G/2023/PTUN-JKT	130/G/TF/2023/PTUN-JKT	
168	533/G/2023/PTUN-JKT	183/G/TF/2023/PTUN-JKT	

169	390/G/TF/2023/PTUN-JKT	185/G/TF/2023/PTUN-JKT	
170	504/G/2023/PTUN-JKT	186/G/TF/2023/PTUN-JKT	
171	505/G/TF/2023/PTUN-JKT	209/G/TF/2023/PTUN-JKT	
172	525/G/TF//2023/PTUN-JKT	210/G/TF/2023/PTUN-JKT	
173	309/G/2023/PTUN-JKT	211/G/TF/2023/PTUN-JKT	
174	551/G/2023/PTUN-JKT	145/G/2023/PTN-JKT	
175	474/G/TF/2023/PTUN-JKT	148/G/TF/2023/PTN-JKT	
176	425/G/TF/2023/PTUN-JKT	169/G/TF/2023/PTN-JKT	
177	426/G/TF/2023/PTUN-JKT	150/G/2023/PTN-JKT	
178	404/G/TF/2023/PTUN-JKT	222/G/TF/2022/PTN-JKT	
179	405/G/TF/2023/PTUN-JKT	223/G/TF/2022/PTN-JKT	
180	546/G/TF/2023/PTUN-JKT	224/G/TF/2022/PTN-JKT	
181	412/G/TF/2023/PTUN-JKT	273/G/TF/2022/PTUN-JKT	
182	410/G/TF/2023/PTUN-JKT	241/G/TF/2022/PTUN-JKT	
183	411/G/TF/2023/PTN-JKT	170/G/TF/2023/PTUN-JKT	
184	409/G/TF/2023/PTN-JKT	184/G/TF/2023/PTUN-JKT	
185	423/G/TF/2023/PTN-JKT	190/G/TF/2023/PTUN-JKT	
186	424/G/TF/2023/PTN-JKT	83/G/TF/2023/PTUN-JKT	
187	433/G/TF/2023/PTN-JKT	171/G/TF/2023/PTUN-JKT	
188	499/G/TF/2023/PTN-JKT	149/G/2023/PTUN-JKT	
189	527/G/TF/2023/PTN-JKT	74/G/2023/PTUN-JKT	
190	429/G/TF/2023/PTUN-JKT	139/G/TF/2023/PTN-JKT	
191	538/G/TF/2023/PTUN-JKT	147/G/2023/PTN-JKT	
192	415/G/TF/2023/PTUN-JKT	216/G/TF/2023/PTUN-JKT	
193	439/G/TF/2022/PTUN-JKT	242/G/KI/2023/PTUN-JKT	
194	583/G/TF/2022/PTUN-JKT	152/G/2023/PTUN-JKT	
195	578/G/2023/PTUN-JKT	165/G/2023/PTUN-JKT	
196	428/G/TF/2023/PTUN-JKT	199/G/TF/2023/PTUN-JKT	
197	434/G/TF/2023/PTUN-JKT	162/G/TF/2023/PTUN-JKT	
198	455/G/TF/2023/PTUN-JKT	167/G/2023/PTUN-JKT	
199	456/G/TF/2023/PTN-JKT	178/G/2023/PTUN-JKT	
200	566/G/TF/2023/PTN-JKT	212/G/TF/2023/PTUN-JKT	
201	592/G/TF/2023/PTUN-JKT	229/G/2023/PTUN-JKT	
202	585/G/2023/PTUN-JKT	200/G/2023/PTUN-JKT	
203	491/G/KI/2023/PTUN-JKT	257/G/TF/2023/PTUN-JKT	
204	601/G/SPPU/2023/PTUN-JKT	258/G/TF/2023/PTUN-JKT	
205	449/G/TF/2023/PTUN-JKT	213/G//2023/PTUN-JKT	
206	443/G/TF/2023/PTUN-JKT	231/G/TF/2023/PTUN-JKT	
207	447/G/TF/2023/PTUN-JKT	248/G/TF/2023/PTUN-JKT	
208	448/G/TF/2023/PTUN-JKT	267/G/TF/2023/PTUN-JKT	
209	587/G/2023/PTUN-JKT	217/G/TF/2023/PTUN-JKT	
210	589/G/2023/PTUN-JKT	252/G/TF/2023/PTUN-JKT	
211	551/PLW/2023/PTUN-JKT	187/G/2023/PTN-JKT	

212.	641/G/2023/PTUN-JKT	205/G/2023/PTN-JKT	
213.	637/G/SPPU/2023/PTUN-JKT	266/G/TF/2023/PTUN-JKT	
214.	639/G/SPPU/2023/PTUN-JKT	260/G/TF/2023/PTUN-JKT	
215.	484/G/2023/PTUN-JKT	261/G/TF/2023/PTUN-JKT	
216.	486/G/TF/2023/PTUN-JKT	262/G/TF/2023/PTUN-JKT	
217.	487/G/TF/2023/PTUN-JKT	299/G/TF/2023/PTUN.JKT	
218.	488/G/TF/2023/PTUN-JKT	207/G/2023/PTUN.JKT	
219.	600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT	247/G/2023/PTUN.JKT	
220.	611/G/2023/PTN-JKT	278/G/2023/PTUN.JKT	
221.	646/G/2023/PTN-JKT	239/G/2023/PTUN.JKT	
222.	647/G/2023/PTUN-JKT	268/G/TF/2023/PTUN.JKT	
223.	648/G/2023/PTUN-JKT	250/G/2023/PTUN.JKT	
224.	651/G/2023/PTUN-JKT	277/G/TF/2023/PTUN.JKT	
225.	652/G/2023/PTUN-JKT	298/G/TF/2023/PTUN.JKT	
226.	653/G/2023/PTUN-JKT	305/G/TF/2023/PTUN.JKT	
227.	249/PLW/2023/PTUN-JKT	226/G/2023/PTUN.JKT	
228.	551/LW/2023/PTUN-JKT	227/G/2023/PTUN.JKT	
229.		225/G/2023/PTUN.JKT	
230.		243/G/2023/PTUN.JKT	
231.		320/G/2023/PTUN.JKT	
232.		270/G/2023/PTUN.JKT	
233.		347/G/2023/PTUN.JKT	
234.		304/G/TF/2023/PTUN.JKT	
235.		271/G/TF/2023/PTUN.JKT	
236.		251/G/TF/2023/PTUN.JKT	
237.		286/G/2023/PTUN.JKT	
238.		358/G/TF/2023/PTUN.JKT	
239.		264/G/2023/PTUN.JKT	
240.		215/G/2023/PTUN.JKT	
241.		240/G/TF/2023/PTUN.JKT	
242.		295/G/2023/PTUN.JKT	
243.		319/G/TF/2023/PTUN.JKT	
244.		360/G/TF/2023/PTUN.JKT	
245.		310/G/TF/2023/PTUN.JKT	
246.		328/G/2023/PTUN.JKT	
247.		331/G/2023/PTUN.JKT	
248.		362/G/2023/PTUN.JKT	
249.		339/G/TF/2023/PTUN.JKT	
250.		273/G/TF/2023/PTUN.JKT	
251.		364/G/TF/2023/PTUN.JKT	
252.		377/G/TF/2023/PTUN.JKT	
253.		378/G/TF/2023/PTUN.JKT	
254.		321/G/TF/2023/PTUN.JKT	

255.		367/G/TF/2023/PTUN.JKT	
256.		388/G/TF/2023/PTUN.JKT	
257.		290/G/2023/PTUN.JKT	
258.		291/G/2023/PTUN.JKT	
259.		297/G/TF/2023/PTUN.JKT	
260.		324/G/TF/2023/PTUN.JKT	
261.		294/G/2023/PTUN.JKT	
262.		311/G/2023/PTUN.JKT	
263.		335/G/TF/2023/PTUN.JKT	
264.		375/G/TF/2023/PTUN.JKT	
265.		376/G/TF/2023/PTUN.JKT	
266.		523/G/TF/2023/PTUN.JKT	
267.		387/G/TF/2023/PTUN.JKT	
268.		389/G/TF/2023/PTUN.JKT	
269.		393/G/TF/2023/PTUN.JKT	
270.		394/G/TF/2023/PTUN.JKT	
271.		334/G/2023/PTUN.JKT	
272.		386/G/TF/2023/PTUN.JKT	
273.		397/G/TF/2023/PTUN.JKT	
274.		393/G/TF/2023/PTUN.JKT	
275.		398/G/TF/2023/PTUN.JKT	
276.		401/G/TF/2023/PTUN.JKT	
277.		396/G/TF/2023/PTUN.JKT	
278.		352/G/TF/2023/PTUN.JKT	
279.		354/G/TF/2023/PTUN.JKT	
280.		403/G/TF/2023/PTUN.JKT	
281.		459/G/TF/2023/PTUN.JKT	
282.		419/G/2023/PTUN.JKT	
283.		427/G/TF/2023/PTUN.JKT	
284.		384/G/TF/2023/PTUN.JKT	
285.		326/G/2023/PTUN.JKT	
286.		355/G/2023/PTUN.JKT	
287.		435/G/TF/2023/PTUN.JKT	
288.		395/G/TF/2023/PTUN.JKT	
289.		301/G/2023/PTUN.JKT	
290.		452/G/TF/2023/PTUN.JKT	
291.		453/G/TF/2023/PTUN.JKT	
292.		446/G/TF/2023/PTUN.JKT	
293.		450/G/TF/2023/PTUN.JKT	
294.		392/G/2023/PTUN.JKT	
295.		407/G/TF/2023/PTUN.JKT	
296.		408/G/TF/2023/PTUN.JKT	
297.		430/G/TF/2023/PTUN.JKT	

298.		348/G/2023/PTUN-JKT	
299.		366/G/TF/2023/PTUN-JKT	
300.		372/G/TF/2023/PTUN-JKT	
301.		359/G/2023/PTUN-JKT	
302.		391/G/2023/PTUN-JKT	
303.		413/G/2023/PTUN-JKT	
304.		414/G/2023/PTUN-JKT	
305.		445/G/2023/PTUN-JKT	
306.		371/G/2023/PTUN-JKT	
	228 Perkara	306 Perkara	119 Perkara
Jumlah Keseluruhan : 653 Perkara			

3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2023

Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara			Putusan						Sisa Perkara	Permohonan			
		Masuk	Dicabut	Jumlah	Gugur	Dicabut	Ditolak	Tidak Dikabulkan	Dikabulkan	Jumlah		Banding	Kasasi	PK	Eksekusi
2	3	4	5	6	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
GUGATAN															
Pertanahan	18	56	5	69	1	11	8	21	7	48	21	26	13	11	-
Kepegawaian	2	20	1	21	2	4	5	3	2	16	5	9	7	-	1
Perijinan	34	64	5	93	-	8	6	14	31	59	34	50	43	10	3
Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tender / Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Hukum/ Parpol	5	43	5	43	1	1	5	17	5	29	14	14	6	6	10
Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Proses Pemilihan Umum	5	9	-	14	-	-	-	11	3	14	-	-	-	2	1
Penggantian Antar Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sengketa Informasi Publik/KIP	-	6	-	6	-	-	-	2	2	4	2	-	1	2	-
Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tindakan Administrasi Pemerintahan	51	340	7	384	1	52	24	53	198	328	56	212	46	6	4
Merek	2	2	1	3	-	-	-	2	-	2	1	2	1	-	-
Lain Lain	52	138	11	179	14	18	19	47	21	118	61	54	34	5	1
JUMLAH	169	678	35	812	19	88	67	169	269	618	194	367	154	43	20

Keterangan

- **Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding**

Jumlah Perkara Putus Tahun 2023 sejumlah **653** Perkara, dikurangi Perkara Permohonan Banding sebanyak **367** Perkara, jadi perkara yang tidak mengajukan hukum Banding sebanyak **286** Perkara.

- **Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Jumlah Perkara banding di Tahun 2023 sejumlah **367** Perkara, dikurangi Perkara Permohonan Kasasi sebanyak **154** Perkara, jadi perkara yang tidak mengajukan hukum Kasasi sebanyak **213** Perkara.

- **Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)**

Jumlah Perkara Kasasi di Tahun 2023 sejumlah **154** Perkara, dikurangi Perkara Permohonan PK sebanyak **43** Perkara, jadi perkara yang tidak mengajukan hukum PK sebanyak **111** Perkara.

Biaya Perkara / Panjar Biaya Perkara

No.	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Saldo Awal	Rp. 1.239.369.037			
2	Penerimaan Tahun ini		Rp. 1.728.375.150		
3	Biaya Proses/ ATK / Pemberkasan			Rp. 168.650.000	
4	Biaya Panggilan			Rp. 75.567.500	
5	Biaya Pemberitahuan			Rp. 95.362.000	
6	Biaya Pemeriksaan Setempat			Rp. 254.030.600	
7	Pengiriman Biaya Perkara			Rp. 269.310.000	
8	Materai			Rp. 7.370.000	
9	PNBP a. Pendaftaran b. Redaksi c. Lainnya d. Sisa Panjar dibayar			Rp. 61.455.000 Rp. 14.740.000 Rp. 68.012.500 Rp. 22.193.700	
10	Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara			Rp. 199.630.527	
11	Biaya Lainnya Pengumuman Media			-	
12	Pemberkasan dan Pengiriman			Rp. 143.056.250	
	Jumlah	Rp. 1.239.369.037	Rp. 1.728.375.150	Rp. 1.379.378.077	Rp. 1.588.366.110

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

1. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum adalah Layanan yang dibentuk oleh Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka pemerataan akan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu (Justice For All), maka disusunlah suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat dengan dibiayai oleh negara.

Pengadaan Jasa Konsultan Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum yang bersumber dari dana APBN DIPA TA 2023 Nomor SP DIPA-005.05.2.526733/2023 tanggal 30 November 2022 dilaksanakan dengan menggunakan metode Pengadaan Langsung.

Dalam Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah merealisasikan pelaksanaan Posbakum dengan jumlah layanan 96 orang Layanan dengan Biaya sebesar Rp. 32.900.000,- yang seluruhnya dibiayai dari anggaran DIPA 05 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

2. Prodeo

Prodeo adalah Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usah Negara Jakarta dengan menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehingga setiap orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-Cuma.

Selama periode tahun 2023 jumlah perkara dengan biaya Cuma-Cuma / Prodeo sebanyak 1 Perkara.

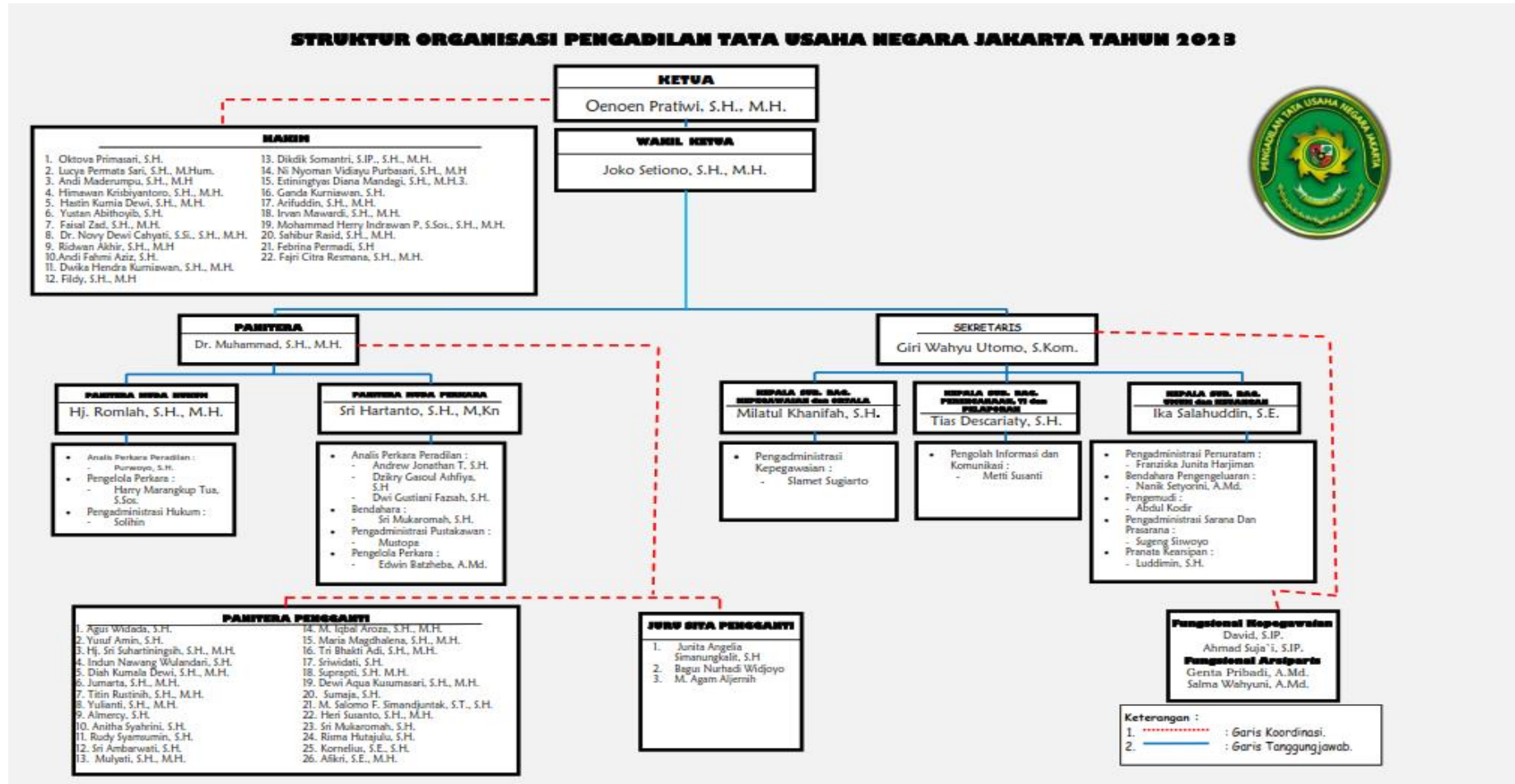
Anggaran Perkara Prodeo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023 berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-005.05.2.526733/2023 tanggal 30 November 2022 terdapat anggaran belanja biaya Perkara Prodeo untuk 1 (satu) perkara sebesar Rp. 650.000,-.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

**REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI MENURUT PANGKAT, GOLONGAN PENDIDIKAN
DAN JENIS KELAMIN BERDASARKAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

No	JABATAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN		GOL. IV					GOL. III					GOL. II					GOL. I					GOL.					PENDIDIKAN										KETERANGAN
			LK	PR	a	d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	a	d	VI	S.3	S.2	S.1	D.3	DLTA	SMP	SD										
I HAKIM																																								
	1. KETUA	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. WAKIL KETUA	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3. HAKIM	22	15	7	-	-	-	2	18	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4. CALON HAKIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II KEPANITIAHAN																																								
	1. PANETERA	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2. PANETERA MUDA	2	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3. PANETERA PENGGANTI	26	11	15	-	-	-	12	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. JURUSITA PENGGANTI	3	2	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III SEKRETARIATAN																																								
	1. SEKRETARIS	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2. KASUB BAG. KEPENGAWAIAN, ORGANSASI DAN TATA LAKSANA	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3. KA. SUBBAG. UMUM DAN KEUANGAN	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4. KA. SUB BAG. PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5. STAF	19	14	5	-	-	-	2	17	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	79	47	32	0	0	2	3	38	24	1	8	5	0	4	8	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	26	28	4	8	8	8	1							

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA



Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sampai dengan bulan Desember 2023 adalah sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) orang yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) orang laki-laki dan 35 (tiga puluh lima) orang perempuan.

A.1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

a. Hakim

Jumlah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebanyak 24 (dua puluh empat) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Keterangan
1.	Oenoen Pratiwi, S.H., M.H. Nip. 19721026 199203 2 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua	
2.	Joko Setiono, S.H., M.H. Nip. 19681215 199603 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Wakil Ketua	
3.	Oktova Primasari, S.H. Nip. 19751002 200212 2 002	Pembina Tk. I (IV/b)	Hakim	
4.	Andi Maderumpu, S.H., M.H. Nip. 19800502 200312 1 001	Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim	
5.	Lucya Permata Sari, S.H., M.Hum. Nip. 19770217 200312 2 002	Pembina (IV/a)	Hakim	
6.	Himawan Krisbiyantoro, S.H., M.H. Nip. 19790217 200312 1 001	Pembina (IV/a)	Hakim	
7.	Hastin Kurnia Dewi, S.H., M.H. Nip. 19751208 200502 2 001	Pembina (IV/a)	Hakim	
8.	Yustan Abithoyib, S.H. Nip. 19750227 200502 1 001	Pembina (IV/a)	Hakim	

9.	Faisal Zad, S.H., M.H. Nip. 19750514 200502 1 001	Pembina (IV/a)	Hakim	
10.	Dr. Novy Dewi Cahyati, S.Si, S.H., M.H. Nip. 19801104 200604 2 004	Pembina (IV/a)	Hakim	
11.	Ridwan Akhir, S.H., M.H. Nip. 19730723 200604 1 002	Pembina (IV/a)	Hakim	
12.	Andi Fahmi Azis, S.H. Nip. 19800530 200604 1 007	Pembina (IV/a)	Hakim	
13.	Dwika Hendra Kurniawan, S.H., M.H. Nip. 19731127 200604 1 004	Pembina (IV/a)	Hakim	
14.	Fildy, S.H., M.H. Nip. 19781210 200604 1 004	Pembina (IV/a)	Hakim	
15.	Dikdik Somantri, S.H., S.IP., M.H. Nip. 19730227 200604 1 001	Pembina (IV/a)	Hakim	
16.	Ni Nyoman Vidiayu Purbasari, S.H., M.H. Nip. 19740413 200604 2 003	Pembina (IV/a)	Hakim	
17.	Estiningtyas Diana Mandagi, S.H., M.H. Nip. 19810612 200604 2 003	Pembina (IV/a)	Hakim	
18.	Mohammad Herry Indrawan Patiradja, S.Sos., S.H., M.H. Nip. 19780708 200805 1 001	Pembina (IV/a)	Hakim	
19.	Ganda Kurniawan, S.H. Nip. 1983013 200704 1 001	Pembina (IV/a)	Hakim	
20.	Arifuddin, S.H. Nip. 19820124 200704 1 001	Pembina (IV/a)	Hakim	
21.	Sahibur Rasid, S.H., M.H. Nip. 19790715 200805 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Hakim	
22.	Irvan Mawardi, S.H., M.H. Nip. 19800609 200805 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Hakim	
23.	Fajri Citra Resmana, S.H., M.H. Nip. 19840709 200912 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Hakim	
24.	Febrina Permadi, S.H. Nip. 19850218 200912 2 005	Penata Tk. I (III/d)	Hakim	

b. Kepaniteraan

Jumlah personil Kepaniteraan sebanyak 31 orang termasuk Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Keterangan
1.	Muhammad, SH, MH Nip. 19690520 199203 1 004	Pembina Tk. I (IV/b)	Panitera	
2.	Sri Hartanto, SH, M.Kn Nip. 19700411 199103 1 003	Pembina (IV/a)	Panmud Perkara	
3.	Hj. Romlah, SH, MH Nip. 19680828 199303 2 002	Pembina (IV/a)	Panmud Hukum	
4.	Hj. Sri Suhartiningsih, SH, MH Nip. 19691119 198903 2 001	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	
5.	Diah Kumala Dewi, SH, MH Nip. 19690616 199303 2 002	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	
6.	Jumarta, SH, MH Nip. 19660324 199603 1 001	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	
7.	Titin Rustinih, SH, MH Nip. 19710101 199603 2 004	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	
8.	Heri Susanto, SH, MH Nip. 19680924 200212 1 005	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	
9.	Sri Ambarwati, SH, MH Nip. 19730121 199703 2 001	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	
10.	Mulyati, SH, MH Nip. 19740209 199903 2 002	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	
11.	Yulianti, SH, MH Nip. 19760718 199903 2 004	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	
12.	M. Iqbal Aroza, SH Nip. 19780610 200003 1 003	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	
13.	Maria Maghdalena Hutapea, SH, MH Nip. 19690815 199603 2 002	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	
14.	Tri Bhakti Adi, SH, MH Nip. 19750824 199803 1 002	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	

15.	Afikri, SE, MH Nip. 19740708 200604 1 003	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	
16.	Yusuf Amin, SH Nip. 19670127 199103 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	
17.	Indun Nawang Wulandari, SH Nip. 19701106 199503 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	
18.	Almercy, SH Nip. 19670901 199803 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	Diperbantukan pada PTUN Medan
19.	Rudi Syamsumin, SH Nip. 19751207 199903 1 005	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	
20.	Anitha Syahrini, SH Nip. 19740402 200003 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	
21.	Sri Mukaromah, SH Nip. 19650529 199103 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	
22.	Sriwidati, SH Nip. 19750721 200012 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	
23.	Risma Hutajulu, SH Nip. 19681006 199103 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	
24.	Suprapti, SH, MH Nip. 19731028 200112 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	
25.	Dewi Aqua Kusumasari, SH, MH Nip. 19840204 200904 2 011	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	
26.	Sumaja, SH Nip. 19670816 199303 1 006	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	
27.	M. Salomo F. Simandjuntak, ST, SH Nip. 19750222 200912 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	
28.	Kornelius, SE, SH Nip. 19800719 200912 1 003	Penata (III/c)	Panitera Pengganti	

c. Jurusita Pengganti

Jumlah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebanyak 3 (tiga) orang, sebagai berikut :

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Keterangan
1.	Junita Angelia Simanungkalit, SH Nip. 19850627 200904 2 006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Jurusita Pengganti	
2.	Bagus Nurhadi Widjoyo Nip. 19871104 200604 1 001	Pengatur Tk. I (II/d)	Jurusita Pengganti	
3.	Muhammad Agam Aljernih Nip. 19841019 200604 1 002	Pengatur Tk. I (II/d)	Jurusita Pengganti	

A.2. Sumber Daya Manusia Non - Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Non - Teknis Yudisial / Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebanyak 14 (empat belas) orang termasuk Pejabat Struktural, Fungsional, Pelaksana, dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai berikut :

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Ket
1.	Giri Wahyu Utomo, S.Kom. Nip. 19840326 200904 1 004	Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris	
2.	Milatul Khanifah, SH Nip. 19730515 199203 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasub. Bag. Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	
3.	Ika Salahudin, SE Nip. 19720411 200604 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasub. Bag. Umum dan Keuangan	
4.	Tias Descariasty, SH Nip.19841209 200604 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Kasub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	
5.	Luddimin, S.H. Nip. 19720429 199303 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Pengolah Data dan Informasi	

6.	Nanik Setyorini, A.Md. Nip. 19740321 199703 2 001	Penata (III/c)	Penelaah Teknis Kebijakan	
7.	Slamet Sugiarto Nip. 19690609 199103 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Perkantoran	
8.	Franziska Junita Harjiman Nip. 19700618 199103 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Perkantoran	
9.	Ahmad Suja'I, S.IP. Nip. 19860614 201903 1 005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	
10.	David, S.IP. Nip. 19930614 201903 1 005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	
11.	Sugeng Siswoyo Nip. 19680122 200604 1 001	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Perkantoran	
12.	Genta Pribadi, A.Md. Nip. 19870315 202012 1 002	Pengatur (II/c)	Arsiparis Terampil / Pelaksana	
13.	Abdul Kodir Nip. 19700408 201212 1 003	Juru (I/c)	Pengemudi	
14.	Salma Wahyuni, A.Md. Nip. 19960928 202321 2 022	Tujuh (VII)	Arsiparis Terampil / Pelaksana	

Jumlah Staf di Kepaniteraan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebanyak 9 orang, sebagai berikut :

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Ket
1.	Harry Marangkup Tua, S.Sos. Nip. 19811222 200604 1 005	Penata Tk. I (III/d)	Pengelola Penanganan Perkara	
2.	Purwoyo, S.H. Nip. 19800714 200604 1 013	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Perkara Peradilan	

3.	Metti Susanti Nip. 19750617 200212 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Perkantoran	
4.	Andrew Jonathan Tarigan, S.H. Nip. 19871202 201903 1 003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Perkara Peradilan	
5.	Dzikry Gaosul Ashfiya, S.H. Nip. 19920215 202203 1 003	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan	
6.	Dwi Gustiani Fazsah, S.H. Nip. 19990818 202203 2 005	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan	
7.	Mustopa Nip. 19700314 200604 1 001	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Perkantoran	
8.	Solihin Nip. 19800908 200604 1 016	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Perkantoran	
9.	Edwin Bathzeba, A.Md. Nip. 19880211 202012 1 005	Pengatur (II/c)	Pengelola Penanganan Perkara	

Jumlah tenaga kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 11 orang , sebagai berikut :

No.	Nama / NIP	Keterangan
1.	Della Wahyudin	Satpam
2.	Asep Saepudin	Satpam
3.	Heru Setiawan, A.Md	Satpam
4.	M. Rizky Putrasyah	Pramubakti
5.	Mamat Nurahmat	Pramubakti
6.	Hasyim, SH	Pramubakti
7.	M. Rizal Muslim, A.Md	Pramubakti
8.	Jana amelia L Tobing	Pramubakti
9.	Devika Rahmanda	Pramubakti
10.	Bagus Nur Ronggo Pamelang	Satpam
11.	Rangga Nur Hidayat	Satpam

A. Mutasi**HAKIM**

Mutasi Masuk Kedalam Wilayah :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	Oenoen Pratiwi, S.H., M.H. Nip. 19721026 199203 2 001	Ketua PTUN Bandung	Ketua PTUN Jakarta	T.M.T 27-07-2023
2.	Joko Setiono, S.H., M.H. Nip. 19681215 199603 1 003	Ketua PTUN Banjarmasin	Wakil Ketua PTUN Jakarta	T.M.T 05-01-2023
3.	Fajri Citra Resmana, S.H., M.H. NIP. 198407092009121002	Hakim PTUN Semarang	Hakim PTUN Jakarta	T.M.T 09-01-2023
4.	Faisal Zad, S.H., M.H., NIP. 197505142005021001	Hakim PTUN Bandung	Hakim PTUN Jakarta	T.M.T 16-01-2023
5.	Dikdik Somantri, S.H., M.H. NIP. 197302272006041001	Hakim PTUN Bandung	Hakim PTUN Jakarta	T.M.T 16-01-2023
6.	Irvan Mawardi, S.H., M.H. NIP. 198006092008051001	Hakim PTUN Bandung	Hakim PTUN Jakarta	T.M.T 16-01-2023
7.	Ganda Kurniawan, S.H. NIP. 198301312007041001	Hakim PTUN Surabaya	Hakim PTUN Jakarta	T.M.T 17-01-2023
8.	Rut Endang Lestari, S.H. NIP. 197609302001122002	Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI	Hakim PTUN Jakarta	T.M.T 19-01-2023
9.	Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. NIP. 198009172003121001	Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI	Hakim PTUN Jakarta	T.M.T 19-01-2023
10.	Arifuddin, S.H., M.H. NIP. 198201242007041001	Hakim PTUN Samarinda	Hakim PTUN Jakarta	T.M.T 19-01-2023
11.	Lucy Permata Sari, SH, M.Hum NIP. 197702172003122001	Hakim PTUN Serang	Hakim PTUN Jakarta	TMT 03 Juli 2023

12.	Mohammad Herry Infrawan Patiradja, S.Sos, SH, MH NIP. 197807082008051001	Hakim PTUN Serang	Hakim PTUN Jakarta	TMT 03 Juli 2023
13.	Fildy, SH, MH Nip. 197812102006041004	Hakim PTUN Makassar	Hakim PTUN Jakarta	TMT 03 Juli 2023
14.	Febrina Permadi, SH Nip. 198502182009122005	Hakim PTUN Serang	Hakim PTUN Jakarta	TMT 03 Juli 2023
15.	Ridwan Akhir, SH, MH Nip. 197307232006041002	Hakim PTUN Semarang	Hakim PTUN Jakarta	TMT 13 Juli 2023
16.	Yustan Abithoyib, SH Nip. 197502272005021001	Hakim PTUN Bandung	Hakim PTUN Jakarta	TMT 13 Juli 2023
17.	Hastin Kurnia Dewi, SH, MH Nip. 197512082005022001	Hakim PTUN Bandung	Hakim PTUN Jakarta	TMT 25 Juli 2023

PEGAWAI

Mutasi Masuk Kedalam Wilayah :

NO.	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	Giri Wahyu Utomo, S.Kom. Nip. 19840326 200904 1 004	Kasubag Kepegawaian & TI PTTUN Jakarta	Sekretaris PTUN Jakarta	10 November 2023
2.	Ahmad Suja'l, S.IP. Nip. 19860614 201903 1 005	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama PTUN Gorontalo	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama PTUN Jakarta	06 November 2023

3.	David, S.IP. Nip. 19930614 201903 1 005	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama PTTUN Makassar	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama PTUN Jakarta	19 Juni 2023
4.	Genta Pribadi, A.Md. Nip. 19870315 202012 1 002	Arsiparis Terampil / Pelaksana PTUN Banda Aceh	Arsiparis Terampil / Pelaksana PTUN Jakarta	16 November 2023

Mutasi Keluar Wilayah

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	Indaryadi, S.H., M.H.	Ketua PTUN Jakarta	Hakim Tinggi PTTUN Mataram	
2.	Kusman, S.Ip., S.H., M.Hum NIP. 197005151991031012	Wakil Ketua PTUN Jakarta	Ketua PTUN Serang	T.M.T 04-01-2023
3.	Dr. Nasrifal, S.H., M.H. NIP. 197406072000121001	Hakim Pengadilan TUN Jakarta	Hakim Yustisial Dirjen Badilmiltun	T.M.T 04-01-2023
4.	Merna Cinthia, SH, MH Nip. 19781029 200112 2 001	Hakim PTUN Jakarta	Wakil Ketua PTUN Jayapura	T.M.T 14-02-2023
5.	Dr. Enrico Simanjuntak, SH, MH Nip. 19810127 200604 1 003	Hakim PTUN Jakarta	Hakim PTUN Bandung	T.M.T 13-02-2023
6.	Dr. Eko Yulianto, SH, MH NIP. 198007312002121003	Hakim PTUN Jakarta	Wakil Ketua PTUN Palu	TMT 24 Juli 2023

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

7.	Dr. Sudarsono, SH, MH Nip. 197605032006041004	Hakim PTUN Jakarta	Hakim Yustisial pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I.	TMT 24 Juli 2023
8.	Elfiany, SH, M.Kn Nip. 19771007 200312 2 001	Hakim PTUN Jakarta	Hakim PTUN Bandung	TMT 24 Juli 2023
9.	Pengki Nurpanji, SH, MH Nip. 197806192002121003	Hakim PTUN Jakarta	Wakil Ketua PTUN Ambon	TMT 28 Juli 2023
10.	Indah Mayasari, SH, MH Nip. 19790413 200212 2 004	Hakim PTUN Jakarta	Wakil Ketua PTUN Palangkaraya	TMT 28 Juli 2023
11.	Ruf Endang Lestari NIP. 197609302001122002	Hakim Pada PTUN Jakarta	Wakil Ketua Pada PTUN Yogyakarta	TMT 01 Agustus 2023
12.	Buddiamin Rodding, S.H., M.H Nip. 197905032003121001	Hakim Pada PTUN Jakarta	Hakim Pada PTUN Makassar	TMT 01 Agustus 2023
13.	Akhdiat Sastrodinata, S.H., M.H. Nip. 19810518 200704 1 001	Hakim Pada PTUN Jakarta	Hakim Pada PTUN Bandung	TMT 01 Agustus 2023

Mutasi Pegawai Negeri Sipil :

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	Ono Haryono, S.E. Nip. 19690310 199103 1 003	Sekretaris PTUN Jakarta	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian PTTUN Jakarta	T.M.T. 09 Nopember 2023
2.	Dra. Eni Nuraeni NiP. 196401201991032005	Panitera Pengganti Pada PTUN Jakarta	Panitera Pengganti Pada PTTUN Jakarta	TMT 01 Agustus 2023
3.	Nurwita, A.Md Nip. 19761030 200003 2 001	Pengelola Keuangan Perkara PTUN Jakarta	Pengelola Keuangan Perkara PN. Tangerang	T.M.T 01-02-2023

B. Promosi

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	Giri Wahyu Utomo, S.Kom. Nip. 19840326 200904 1 004	Kasubag Kepegawaian & TI PTTUN Jakarta	Sekretaris PTUN Jakarta	T.M.T 10 November 2023
2.	Afikri, S.E., M.H. Nip. 19740708 200604 1 003	Jurusita Pengganti PTUN Jakarta	Panitera Pengganti PTUN Jakarta	T.M.T 18 Juli 2023
3.	Muhammad Agam Aljernih Nip. 19841019 200604 1 002	Pengolah Informasi dan Komunikasi PTUN Jakarta	Jurusita Pengganti PTUN Jakarta	T.M.T 18 Juli 2023

PEGAWAI BARU :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PENEMPATAN	KETERANGAN
1.	Salma Wahyuni, A.Md	Arsiparis Pelaksana / Terampil (PPPK)	PTUN Jakarta	TMT 01 September 2023

C. Pensiun :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. Nip. 19800917 200312 1 001	Hakim PTUN Jakarta	01 Juli 2023 (Pensiun atas permintaan sendiri)
2.	Sukarnadi	Pengadministrasi Hukum	TMT 1 Mei 2023
3.	Gendro Wisnu Broto	Pengadministrasi Hukum	TMT 1 Juni 2023
4.	Agus Widada, S.H. Nip. 19650824 199303 1 003	Panitera Pengganti	12 Desember 2023 (Meninggal Dunia)

D. DIKLAT

Diklat (SM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

No.	Nama / NIP	Jabatan	Nama Diklat / Bimtek	Lamanya TMT
1.	Fajri Citra Resmana, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Perizinan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	6 s.d 18 Februari 2023

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

2.	Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.	Hakim	Bimbingan Teknis Penyusunan Naskah Kebijakan, Naskah Akademik, dan Naskah Urgensi	15 s.d 17 Februari 2023.
3.	1. Pengki Nurpanji, S.H. 2. Budi Amin Rodding, S.H., M.H. 3. Andi Maderumpu, S.H., M.H. 4. Andi Fahmi Aziz, S.H.	Hakim	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH	21 s.d 24 Februari 2023
4.	1. Nanik Setyorini, A.Md. 2. Heru Setiawan, A.Md. 3. Muhammad Rizki Putrasyah, A.Md.Kom.	1. Bendahara 2. PPNPN 3. PPNPN	Bimbingan Teknis SAKTI bagi Satker Lingkup KPPN Jakarta VI Tahun 2023	27 Februari 2023
5.	1. Ika Salahuddin, S.E. 2. Metti Susanti	1. Kasub Umum dan Keuangan 2. Staf PTIP	Bimbingan Teknis SAKTI bagi Satker Lingkup KPPN Jakarta VI Tahun 2023	28 Februari 2023
6.	1. Arifuddin, S.H, 2. Ganda Kurniawan, S.H.	Hakim	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah Bagi Para Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	13 s.d 15 Maret 2023
7.	1. Ono Haryono, S.E. 2. Hj. Romlah, S.H., M.H. 3. Andrew Jonathan Tarigan, S.H.	1. Sekretaris 2. Panmud Hukum 3. Analis Perkara Peradilan	Bimbingan Teknis Pemberian Layanan Informasi Publik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	13 s.d 15 Maret 2023
8.	1. Faisal Zad, S.H., M.H. 2. Ni Nyoman Vidiayu Purbasari, S.H., M.H. 3. Akhdiat Sastrodinata, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Barang dan Jasa Pemerintah Bagi Hakim Peratun Seluruh Indonesia	Tahap I : 6 s.d 10 Maret 2023 Tahap II : 12 s.d 18 Maret 2023

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

9.	Sahibur Rasid, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pertanahan bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	Tahap I : 20 s.d 24 Maret 2023 Tahap II : 27 Maret s.d 01 April 2023
10.	Irvan Mawardi, S.H., M.H.	Hakim	kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Bawaslu Sebagai Upaya Penguatan dan Pengembangan dan Sinergitas Dengan Stakeholders Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda Serta Pengawas di Tingkat Kecamatan	21 Maret 2023
11.	Dikdik Somantri, S.H., S.IP., M.H.	Hakim	Pengembangan / Penyempurnaan Pelatihan Singkat Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa,	3 s.d 6 April 2023
12.	Dr. Sudarsono, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Proses Pemilihan Pemilu	3 s.d 6 April 2023
13.	Ono Haryono, S.E.	Sekretaris	Workshop Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2023	10 s.d 11 April 2023
14.	Dzikry Gaosul Ashfiya, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara Secara Blended Learning Pada Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	26 April s.d 12 Mei 2023

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

15.	1. Ika Salahuddin, S.E. 2. Metti Susanti	1. Kasub Umum dan Keuangan 2. Pengadministrasi Perkantoran	Bimbingan Teknis Sosialisasi Aplikasi SAKTI dan Optimalisasi Nilai IKPA	30 Mei 2023
16.	1. Himawan Krisbiyantoro, S.H., M.H. 2. Ni Nyoman Vidiayu Purbasari, S.H., M.H.	Hakim	Bimbingan Teknis Pendalaman dan Penajaman Pemeriksaan Sangketa Lingkungan Hidup Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja Bagi Para Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2023	10 s.d 12 Mei 2023
17.	1. Irvan Mawardi, S.H., M.H. 2. Fajri Citra Resmana, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Singkat Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tahap I : 29 Mei 2023 s.d 2 Juni 2023 Tahap II : 5 Juni 2023 s.d 9 Juni 2023
18.	1. Indaryadi, S.H., M.H. 2. Dr. Muhammad, S.H., M.H. 3. Bagus Nurhadi Widjoyo	1. Ketua 2. Panitera 3. Juru Sita Pengganti	Bimbingan Teknis E-Court (Peradilan Elektronik) pada Pengadilan Tk. Banding dan E-Court (Peradilan Elektronik) tentang Proses Pemilu dan Pilkada	17 Mei s.d 19 Mei 2023
19.	Mohamad Syauqie, S.H.,M.H.	Hakim	Bimbingan Teknis Akses Keadilan dan Perlindungan Bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	24 Mei s.d 26 Mei 2023

20.	1. Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. 2. Akhdiat Sastrodinata, S.H., M.H. 3. Ganda Kurniawan, S.H.	Hakim	Pelatihan Singkat Sengketa Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	5 s.d 8 Juni 2023
21.	Kornelius, S.E., S.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	12 s.d 24 Juni 2023
22.	Dr. Novy Dewi Cahyati, S.Si., S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Singkat Sengketa Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	14 Juni 2023
23.	Dikdik Somantri, S.H., S.IP., M.H.	Hakim	Pelatihan Singkat Sengketa Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia.	14 Juni 2023
24.	1. Joko Setiono, S.H., M.H. 2. Oktova Primasari, S.H. 3. Dr. Novy Dewi Cahyati, S.Si., S.H., M.H	1. Wakil Ketua 2. Hakim 3. Hakim	Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Proses Pemilihan Umum Bagi Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	21 s.d 23 Juni 2023
25.	Sri Hartanto, S.H., M.Kn.	Panmud Perkara	Bimbingan Teknis Administrasi Upaya Hukum Banding Secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	21 s.d 23 Juni 2023

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

26.	1. Milatul Khanifah, S.H. 2. Muhammad Agam Aljernih	1. Kasub Kepegawaian 2. Staf	Sosialisasi Standarisasi Layanan Kepegawaian Terkait Implementasi Aplikasi SIASN Bagi Layanan Administrasi Kepegawaian Tenaga Teknis Pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	22 Juni 2023
27.	1. Ika Salahuddin, SE. 2. Muhammad Rizki Putrasyah, A.Md.Kom.	1. Kasub Umum dan Keuangan 2. PPNPN	Sosialisasi Optimalisasi IKPA dan Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) bagi Satker Lingkup KPPN Jakarta VI	22 Juni 2023
28.	1. Ika Salahuddin, S.E. 2. M. Salomo F Simanjuntak, S.T., S.H.	1. Kasub Umum dan Keuangan 2. Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Pendampingan Pengisian Capaian Output Bulan Juni,	7 Juli 2023
29.	1. Dwika Hendra Kurniawan, S.H., M.H. 2. Ni Nyoman Vidiayu Purbasari, S.H., M.H. 3. Estiningtyas Diana Mandagi, S.H., M.H, 4. Arifuddin, S.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Proses Pemilihan Umum Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	17 s.d 21 Juli 2023
30.	IKA SALAHUDDIN, S.E.	Kasub Umum dan Keuangan	Sosialisasi Pengisian Target Capaian Output Satker dan Optimalisasi Penggunaan Digipay-KKP	21 Juli 2023
31.	Dr. Novy Dewi Cahyati, S.Si., S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Proses Pemilihan Umum Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	25 Juli 2023

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

32.	1. Ono Haryono, S.E. 2. Ika Salahuddin, S.E. 3. Heru Setiawan, A.Md.	1. Sekretaris 2. Kasub Umum dan Keuangan 3. PPNPN	Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2023	26 Juli 2023
33.	Dwi Gustiani Fazsah, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara dan Pelatihan Manajemen Administrasi Peradilan Secara Blended Learning Gelombang 3 Tahun 2023	28 Juni s.d 13 Juli 2023
34.	Irvan Mawardi, S.H., M.H.	Hakim	kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi DKI Jakarta	22 Agustus 2023
35.	1. Sri Hartanto, S.H., M.Kn. 2. Muhammad Agam Aljernih	1. Panmud Perkara 2. Juru Sita Pengganti	Bimbingan Teknis Administrasi Pengelolaan Keuangan Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2023	2 s.d 4 Agustus 2023
36.	1. Dr. Novy Dewi Cahyati, S.Si., S.H., M.H. 2. Dikdik Somantri, S.H., S.IP., M.H.	Hakim	Pelatihan Singkat Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik dan Pelatihan Singkat Eksekusi Peradilan TUN	9 s.d 11 Agustus 2023
37.	Irvan Mawardi, S.H., M.H.	Hakim	kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan Tahun 2023 untuk Menyusun kebijakan pencegahan sengketa, konflik dan perkara guna mengurangi dan menekan jumlah	13 September 2023

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

			kasus pertanahan di wilayah Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
38.	Salma Wahyuni, A.Md.	Arsiparis Pelaksana	Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Tahap I: 25 September s.d 13 Oktober 2023. Tahap II : 18 Oktober s.d 23 Oktober 2023
39.	1. Tias Descariasty, S.H. 2. Mohammad Rizal Muslim, A.Md.	1. Kasub PTIP 2. PPNPN	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Bagi ASN Terhadap Penguasaan Teknologi Informasi Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	4 s.d 6 Oktober 2023
40.	1. Bagus Nurhadi Widjoyo 2. Muhammad Agam Aljernih	Juru Sita Pengganti	Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Juru Sita dan Juru Sita Pengganti di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	18 s.d 20 Oktober 2023
41.	Dikdik Somantri, S.H., S.IP., M.H.	Hakim	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Kepegawaian Bagi Para Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	18 s.d 20 Oktober 2023

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (526732)	Rp. 13.465.441.000	Rp. 12.520.923.427	Rp. 944.517.573	-

Rekapitulasi Belanja Barang Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (526732)	Rp. 2.767.724.000	Rp. 2.749.825.411	Rp. 17.898.589	-

Program Sarana dan Prasarana

Program Sarana Dan Prasarana Tahun 2023 Untuk PTUN Jakarta Mendapat Pagu Anggaran Sebesar Rp. 10.000.000 ,- Dengan Perincian :

1. Belanja Pegawai Rp. 13.465.441.000,-
2. Belanja Barang Rp. 2.767.724.000,-
3. Belanja Modal Rp. 10.000.000,-
4. Ekstrakomptabel Rp. 6.750.000,-

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN

Program peningkatan manajemen peradilan tahun 2023 untuk PTUN JAKARTA mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 49.550.000.

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (526733)	Rp. 49.550.000	Rp. 49.531.400	Rp. 18.000	-

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

No	Sarana / Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1. a	Ruang Ketua	1	Ruangan
	- Meja Ruang Ketua	1	Unit
	- Kursi Kerja Ketua	1	Unit
	- Kursi Hadap Ketua	2	Unit
	- Lemari Buku Kaca Ketua	1	Unit
	- Lemari Bufet	2	Unit
	- Sofa tamu dalam	1	Set
	- Sofa tamu luar	2	Set
	- Lemari toga	1	Unit
	- Sofa bed	1	Unit
	-TV	1	Unit
1. b	Ruang Rapat Ketua	1	Ruangan
	-Meja Rapat	1	Set
	-Kursi Kerja	12	Unit
	-Kursi Besi/Metal	20	Unit
	-TV	1	Unit
2	Ruang Wakil	1	Ruangan
	- Meja Ruang	1	Unit
	- Kursi Kerja	1	Unit

	- Kursi Hadap	2	Unit
	- Lemari Buku Kaca	2	Unit
	- Lemari Bufet	1	Unit
	- Sofa tamu dalam	1	Set
	- Sofa tamu luar	1	Set
	- Lemari toga	1	Unit
	- Sofa bed	1	Unit
	-TV	1	Unit
3. a	Ruang Hakim (yang terisi 26 ruangan)	30	Ruangan
	- Meja Kerja	30	Unit
	- Kursi Kerja	30	Unit
	- Kursi Hadap	30	Unit
	- Lemari Toga	30	Unit
	-Filling Cabinet	30	Unit
3.b	Ruang Rapat Hakim	1	Ruangan
	-Meja Rapat	4	Unit
	-Kursi Kerja	10	Unit
	-Lemari Arsip Kaca	2	Unit
	-Filling Cabinet	1	Unit
3.c	Ruang Dharmayukti Karini	1	Ruangan
	-Meja	16	Unit
	-Kursi	16	Unit
4	Ruang Panitera	1	Ruangan
	- Meja Kerja	1	Unit
	- Kursi Kerja	1	Unit
	- Kursi Hadap	2	Unit
	- Sofa Tamu	1	Set
	-Lemari Besi	1	Unit
	-Filling Cabinet	1	Unit
	-Brandkas	1	Unit
5	Ruang Sekretaris	1	Ruangan
	- Meja Kerja	1	Unit
	- Kursi Kerja	1	Unit

	- Kursi Hadap	2	Unit
	- Sofa Tamu	1	Set
	-Lemari Arsip Kaca	1	Unit
	-Meja Rapat	1	Unit
	-Kursi Rapat	4	Unit
	-Kursi Panjang	1	Unit
	-Buffet Kecil	1	Unit
	-TV	1	Unit
6	Ruang Sidang Umum	5	Ruangan
	- Meja Sidang Hakim	5	Unit
	- Meja Sidang PP	5	Unit
	- Meja Sidang Tergugat	5	Unit
	- Meja Sidang Penggugat	5	Unit
	- Kursi Sidang Hakim Ketua Majelis	15	Unit
	- Kursi Sidang Hakim Anggota	10	Unit
	- Kursi Sidang PP	5	Unit
	-Kursi Pengunjung sidang	45	Unit
7	R. Sidang Pemeriksaan Persiapan	3	Ruangan
	- Meja Sidang Hakim	3	Unit
	- Meja Sidang PP	3	Unit
	- Meja Sidang Tergugat	3	Unit
	- Meja Sidang Penggugat	3	Unit
	- Kursi Sidang Majelis Hakim	9	Unit
	- Kursi Sidang PP	3	Unit
	- Kursi Sidang Penggugat	6	Unit
	-Kursi Sidang Tergugat	6	Unit
	Kursi Futura	8	Unit
8	Ruang Kepaniteraan (Panmud Perkara dan Panmud Hukum)	2	Ruangan
	- Meja Kerja	2	Unit
	- Kursi Kerja	2	Unit
	- Kursi Hadap	4	Unit
	- Filing Kabinet	2	Unit

	-Lemari Kayu	2	Unit
9	Ruang Kesekretariatan (Kasub)	3	Ruangan
a.	Kasub PTIP	1	Ruangan
	- Meja Kerja	5	Unit
	- Kursi Kerja	5	Unit
	- Kursi Hadap	2	Unit
	- Filing Kabinet	2	Unit
	-Lemari Arsip Kaca	5	Unit
b.	Kasub Kepegawaian & Ortala	1	Ruangan
	-Meja Kerja	5	Unit
	-Kursi Kerja	4	Unit
	-Kursi Hadap	2	Unit
	-Lemari Arsip Kaca	7	Unit
	-Filling Cabinet	3	Unit
	-TV	1	Unit
c.	Kasub Umum & Keuangan	1	Ruangan
	-Meja Kerja	7	Unit
	-Kursi Kerja	7	Unit
	-Filling Cabinet	1	Unit
	-Lemari Arsip Kaca	7	Unit
	-Lemari Arsip Besi	1	Unit
	-Brandkas	1	Unit
10	Meja Resepsionis	1	Unit
11	Lemari Arsip Kaca	8	Unit
12	Rak Arsip Besi Siku	80	Unit
13	Kursi Petugas PTSP	7	Unit
14	Kursi Rapat	12	Unit
15	Kursi Tunggu Sidang	25	Unit
16	Meja Kerja JSP dan Staff	22	Unit
17	Kursi Kerja JSP dan Staf	22	Unit
18	Kursi di Media Center	18	Unit
19	Komputer	56	Unit
20	Laptop	23	Unit

21	Printer	50	Unit
22	Scanner	5	Unit
23	Infokus	2	Unit
24	PABX	1	Unit
25	AC Cassete	75	Unit
26	AC Split	20	Unit
27	Genset	1	Unit







Rumah Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas	1993				
1.1	Ketua	1993			✓	
1.2	Wakil	1993			✓	
1.3	Hakim	1993			✓	
1.4	Hakim	1993			✓	
1.5	Hakim	1992		✓		
1.6	Hakim	1992		✓		

Berikut adalah foto keterangan keadaan rumah dinas :

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta		
No	Rumah Dinas 1 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
1		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Ketua PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi rusak berat yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, serta langit-langit akan runtuh. • Membahayakan / beresiko difungsikan, • Perbaikan dengan rekonstruksi.
		
		
		

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta		
No	Rumah Dinas 2 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
2		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi Rusak Ringan yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Atap atap /plafon jebol, • Kusen yang sudah termakan rayap, • Dinding / tembok yang sudah mulai kusam dan rusak • Kaca depan rumah pecah • Pagar roboh
		
		
		
		
		

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta		
No	Rumah Dinas 3 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
3		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi rusak berat yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, • Kompenen penunjang lainnya rusak total • Membahayakan / beresiko difungsikan, • Perbaikan dengan rekontrusi.
		
		
		
		







Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta		
No	Rumah Dinas 4 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
4	A photograph of a single-story house with a red-tiled roof. A silver car is parked in the driveway. A person wearing a yellow headscarf is walking towards the house.	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Wakil Ketua PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi rusak berat yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, • Kompenen penunjang lainnya rusak seperti atap dan pagar • Membahayakan / beresiko difungsikan, • Perbaikan dengan rekonstruksi.
	A photograph of the same house from a different angle, showing a metal fence in the foreground and some greenery.	

Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Altis	2004			✓	
2	Toyota Vios	2009			✓	
3	Proton	2011		✓		
4	Toyota Kijang Kapsul	2003			✓	
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	honda supra x 125D	2007		✓		
2	honda supra x 125D	2007		✓		
3	TIGER GL 200R	2007			✓	Dalam proses penghapusan
4	Honda	2008		✓		
5	Honda	2008		✓		
6	Honda	2008		✓		
7	Honda	2008		✓		
8	Honda	2008		✓		

KENDARAAN DINAS RODA 4				
Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
Toyota Altis		2	Toyota Vios	
	<ul style="list-style-type: none"> - Toyata Altis 1800 cc - Plat Nomor B 1567 GQ - Merk Toyata - Thn 2004 - Kondisi Rusak Ringan 			<ul style="list-style-type: none"> - Toyota Vios 1500 cc - Plat Nomor B 8560 WU - Merk Toyota - Thn 2004 - Kondisi Rusak Ringan
Proton		4	Toyota Kijang HF 80 LX	
	<ul style="list-style-type: none"> - Proton 1300 cc - Plat Nomor B 1414 PQ - Merk Proton - Thn 2011 - Kondisi Rusak Ringan 			<ul style="list-style-type: none"> - Toyota Kijang Kapsul - Plat Nomor B 7684 JQ - Merk Toyota - Thn 2003 - Kondisi Rusak Ringan

KENDARAAN DINAS RODA 2				
Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
Honda Tiger CW 200 cc		2	Honda Supra X 125 D	
	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Tiger CW 200 cc - Plat Nomor B 6017 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Berat 			<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6016 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan
Honda Supra X 125 D		4	Honda Supra X 125 D	
	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6018 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan 			<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6391 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
5	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6392 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 	6	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6393 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Berat
					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
7	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6394 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 	8	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6395 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan
					

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Dalam Mendukung tugas pokok dan Fungsi Pengadilan serta melaksanakan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengintegrasikan teknologi informasi sebagai penunjang utama terhadap kelancaran dan kemudahan pelayanan Publik. Selama tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menerima berupa perangkat-perangkat keras yang memadai seperti Scanner, Laptop, dan terus mengupdate perangkat lunak yang dikelola sendiri atau oleh Mahkamah Agung serta melakukan sinkronisasi data secara berkala kepada Mahkamah Agung.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan pelayanan informasi khususnya informasi perkara kepada masyarakat, antara lain :

- Implementasi E Court

Implementasi pelaksanaan *e-Court* di PTUN Jakarta, sebagai tindaklanjut :

- a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
- b) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
- c) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor: 363 /KMA/SK/XII/2022 Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan

Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,

E-Court sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki issue utama dalam *access to justice*. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tersebut, menjadi tonggak dalam revolusi administrasi perkara menuju peradilan modern, Biaya Ringan, Sederhana.

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023, PTUN Jakarta telah menerima 671 (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu) perkara gugatan dan 7 (Tujuh) perkara permohonan Perlawanan secara *e-Court*, baik perorangan (pengguna lain) maupun melalui kuasa hukum/advokat (pengguna terdaftar) Lahirnya aplikasi *e-court* dan *e-litigasi* serta upaya hukum banding elektronik merupakan bentuk respon Mahkamah Agung untuk menghadirkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan yang lebih efektif dan efisien. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkomitmen dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).

Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi berperkara secara elektronik di dunia peradilan Indonesia, sehingga peradilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Panggilan secara *online*, mengirim dokumen persidangan (jawab, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan penyampaian putusan) dan Upaya Hukum Banding (Permohonan, Akta Banding, Pemberitahuan, Memori, Kontra, Inzage, dan Putusan banding) juga secara *online*. Secara substansial, peraturan Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. *e-Court* merupakan sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online. Aplikasi *e-*

Court, *e-litigasi* perkara dan Upaya Hukum Banding Online diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

- **Implementasi SIPP**

Pelaksanaan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/Djmt.3/SE/2/2016 tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara. Perkembangan instalasi dan penggunaan SIPP dari versi 3.1.1 di tahun 2016 sekarang sudah dikembangkan versinya menjadi 5.3.1 sehingga aplikasi SIPP bisa terintegrasi dengan aplikasi direktori putusan, E-Court, dan memudahkan penginputan data putusan yang diinput di SIPP bisa langsung masuk ke dalam aplikasi direktori Mahkamah Agung, walaupun ada beberapa **kendala dalam aplikasi SIPP seperti Perkara Perlawanan terhadap Penetapan dismissal, Perkara Gugatan Keterbukaan Informasi**, dengan perkembangan tersebut pimpinan di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding maupun Mahkamah Agung dapat memonitoring kinerja Hakim dan Panitera/ Panitera Pengganti, dan Jurusita Pengganti serta staf kepaniteraan perkara dalam penginputan data perkara ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

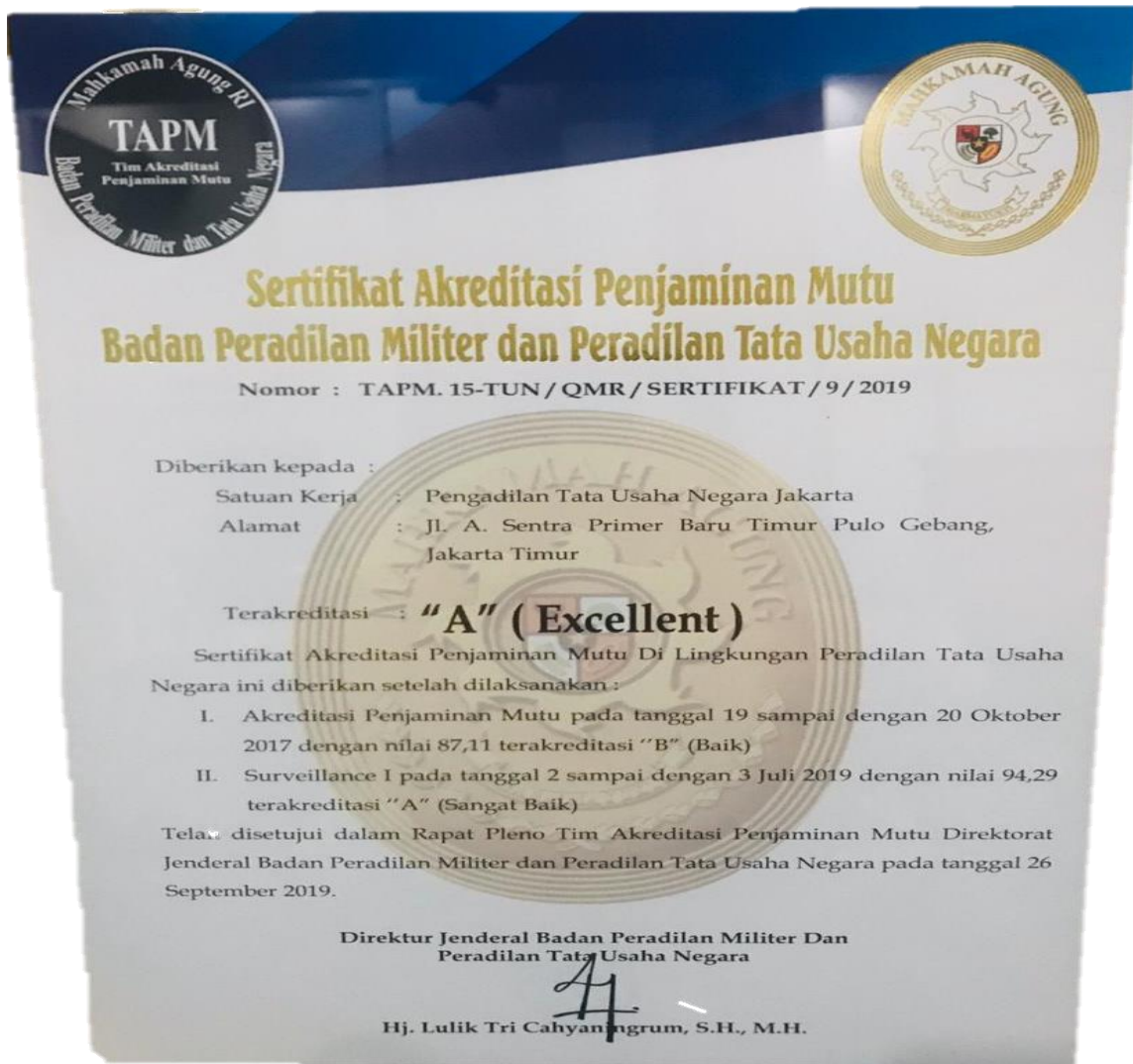
- Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam Rangka Mendukung dan mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka dalam tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dengan menjalankan beberapa program yaitu :

1. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1142/DJMT.3/B/9/2017, Perihal Pelaksanaan Akreditasi Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 September 2017. maka pada tanggal 19 sd 20 Oktober 2017., Telah dilaksanakan Akreditasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Acara Pembukaan dilaksanakan di ruang sidang Kartika dan dibuka langsung oleh PLH Ketua PTUN Jakarta, Bapak Subur MS, SH., MH, Panitera PTUN Jakarta, Bapak Didik Hari Wasito, SH., MH, Sekretaris PTUN Jakarta, Bapak Ono Haryono, SE, Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional beserta Seluruh Staf PTUN Jakarta. Hadir sebagai Ketua Tim Assesor, Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH beserta Rombongan (Tim Assesor PERATUN Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI). Untuk Pemeriksaan Akreditasi dilaksanakan diruang Rapat Ketua PTUN Jakarta. penilaian terhadap 7 (tujuh) area yang menjadi poin-poin utama assesment. 7 (tujuh) Area tersebut yakni Manajemen Kepemimpinan Dan Sumber Daya Manusia, Pola Bindalmin Dan SOP Penyelesaian Perkara, Sarana Dan Prasarana Pengadilan, Pengelolaan SIPP Dan Aplikasi Berbasis IT Lainnya, Pelayanan Meja Informasi Dan Meja Pengaduan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara, dan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu diruang Ketua PTUN Jakarta serta Ruang Kepaniteraan, Kesekretariatan, Hakim, PP dan Posbakum., dari hasil Pemeriksaan dari TIM Assesor Peradilan Tata Usaha Negara Dirjen Badilmiltun, dengan **Hasil Penilaian B.**



2. Kemudian Telah dilaksanakan ulang Hasil Penilaian Akreditasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dilaksanakan di ruang sidang Kartika dan dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Bapak Dr. H. Hari Sugiharto, SH., MH Panitera PTUN Jakarta, Bapak Didik Hari Wasito, SH., MH, Sekretaris PTUN Jakarta, Bapak Ono Haryono, SE, Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional beserta Seluruh Staf PTUN Jakarta. Hadir sebagai Ketua Tim Assesor, Ibu Hj. Lulik Tri Cahya Ningrum, SH., MH beserta Rombongan (Tim Assesor PERATUN Dirjen Badil miltun Mahkamah Agung RI). Dalam kegiatan akreditasi ini terdapat 7 (tujuh) area yang akan dievaluasi, yaitu : Manajemen kepemimpinan dan sumber daya manusia, Pola bindalmin dan SOP penyelesaian perkara, Sarana dan prasarana pengadilan, E Judicary, Layanan Pengadilan, PNBP dan Survei Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Penilaian tersebut dilakukan selama 2 (dua) Hari Kerja dari tanggal 02 Juli s/d 03 tahun 2019, dengan **Hasil Penilaian A (Excellent)**



3. Prestasi yang telah dicapai saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendapat predikat juara ke 3 lomba Video Profile yang di selenggarakan Ditjenbadilmitun ditahun 2022.

4. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendapatkan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan Predikat 'B' di tahun 2022.



5. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berhasil meraih penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada Selasa 10 Desember 2019 bertempat di Birawa Hall, Hotel Bidakara. Perhargaan diterima oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Jakarta Dr. H. Hari Sugiharto, SH., MH melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional. Penghargaan ini diberikan terkait capaian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai *role model* penyelenggara pelayanan publik dengan kategori sangat baik dan karena dianggap telah memenuhi indikator-indikator pencanangan Zona Integritas WBK. Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa perbaikan birokrasi merupakan

langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara lebih cepat, tepat, murah, tidak diskriminatif dan berkualitas. Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang antikorupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selama ini telah melakukan beragam inovasi untuk mewujudkan Zona Integritas antikorupsi WBK/WBBM. Dari perbaikan pelayanan bagi publik, pemasangan spanduk, pengawasan pelayanan, hingga implementasi moto pelayanan antikorupsi bagi semua lini dari staf hingga jajaran pimpinan.





6. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendapatkan Juara favorit pada lomba Lomba Peningkatan Pelayanan khususnya Pengadilan Tingkat Pertama. Penghargaan kepada para pemenang diberikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung pada acara Malam Pemberian Penghargaan Peningkatan Pelayanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di hotel Aryaduta, Bandung, pada Jum'at malam, 3 November 2023.





B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I. nomor : 462/DJMT/KEP/8/2018 :

I. Pasal 11

Tugas, tanggungjawab, dan kewenangan Pengarah PTSP

1. Menetapkan Pelayanan PTSP yang meliputi semua administrasi peradilan terdiri atas permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, penyerahan/pengambilan produk pengadilan, dan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengangkat Pejabat Pengelola, Penanggung jawab dan Petugas PTSP.
3. Mensosialisasikan PTSP kepada Seluruh Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
4. Memberikan Pengarahan kepada Pejabat Pengelola, Penanggung Jawab dan Petugas PTSP.
5. Mengawasi dan mengevaluasi Pelaksanaan PTSP.

II. Pasal 12

Tugas, tanggungjawab, dan kewenangan Pejabat Pengelola PTSP

1. Membuat meja pelayanan terpadu, menyediakan sarana / prasarana sesuai kebutuhan sejumlah Panitera Muda yang ada pada Kepaniteraan dan Sub Bagian pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
2. Menyelenggarakan PTSP secara efektif, efisien dan akuntabel.
3. Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis dan Non Teknis agar pengelolaan PTSP dapat berjalan baik.
4. Pengelola PTSP dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Pengarah PTSP.

III. Pasal 13

Tugas, tanggungjawab, dan kewenangan Penanggungjawab PTSP

1. Membantu Pengelola PTSP dalam mengelola pelayanan pengadilan yang dilaksanakan oleh Petugas PTSP.
2. Penanggung jawab PTSP bertanggungjawab kepada Pengelola PTSP.
3. Membimbing dan membina Petugas PTSP, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas PTSP.

IV. Pasal 15

Tugas, tanggungjawab Petugas PTSP

1. Petugas Kepaniteraan Muda Perkara bertugas melayani :
 - Menerima Pendaftaran Perkara Gugatan.
 - Menerima Pendaftaran Permohonan.
 - Menerima Pendaftaran Perlawanan.
 - Menerima Pendaftaran Permohonan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
 - Menerima memori / kontra memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
 - Menerima Permohonan Sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali.
 - Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
 - Menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan.
 - Menerima pendaftaran permohonan pengawasan eksekusi.
 - Menerima permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
 - Menerima Permohonan sebagai Kuasa Insidentil.
 - Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.
2. Petugas Kepaniteraan Muda Hukum bertugas melayani :
 - Surat Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara Tata Usaha Negara.
 - Permohonan surat izin kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.

- Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - Permohonan pendaftaran surat kuasa.
 - Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di Pengadilan.
 - Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
 - Penanganan pengaduan / SIWAS-MARI.
 - Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.
3. Petugas Kesekretariatan (Sub Bagian Umum dan Keuangan) bertugas :
- Menerima dan menyerahkan seluruh surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
4. Petugas Pelayanan Persidangan bertugas :
- Memberikan informasi dan pelayanan persidangan kepada para pihak / masyarakat pencari keadilan.
5. Petugas PTSP bertanggung jawab kepada Pengelola PTSP.
6. Petugas E Court Corner bertugas :
- a. Pendaftaran E-Court Datang Ke Pengadilan
 - Menerima Gugatan E Court, yang sudah diverifikasi oleh Meja 1;
 - Memberitahukan kepada Meja 1 dan Kasir ;
 - Menginput data Para Pihak dan Data Umum pada Aplikasi SIPP;
 - Membuat User & Password Tergugat di Aplikasi E Court;
 - Membuat User Pengguna Lain di Aplikasi E Court (Non Advokat) ;
 - Menginput Dokumen Intervensi pada Aplikasi E Court ;
 - Menerima Pendaftaran Advokat terdaftar;
 - Membantu pelaksanaan teknis persidangan secara E Court;
 - Konsultasi tentang penggunaan Aplikasi E Court;
 - b. Pendaftaran E-Court tidak Ke Pengadilan
 - Menerima Gugatan E Court, dari Aplikasi E Court;
 - Mencetak dan Memberitahukan kepada Meja 1 dan Kasir ;
 - Menginput data Para Pihak dan Data Umum pada Aplikasi SIPP;
 - Membantu pelaksanaan teknis persidangan secara E Court.

Prosedur, Jam Layanan dan Pengaturan Meja PTSP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

I. PROSEDUR PTSP SEBAGAI BERIKUT :

1. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan.
2. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan.
3. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke Kepaniteraan/Kesekretariatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan.

II. JAM LAYANAN PTSP SEBAGAI BERIKUT :

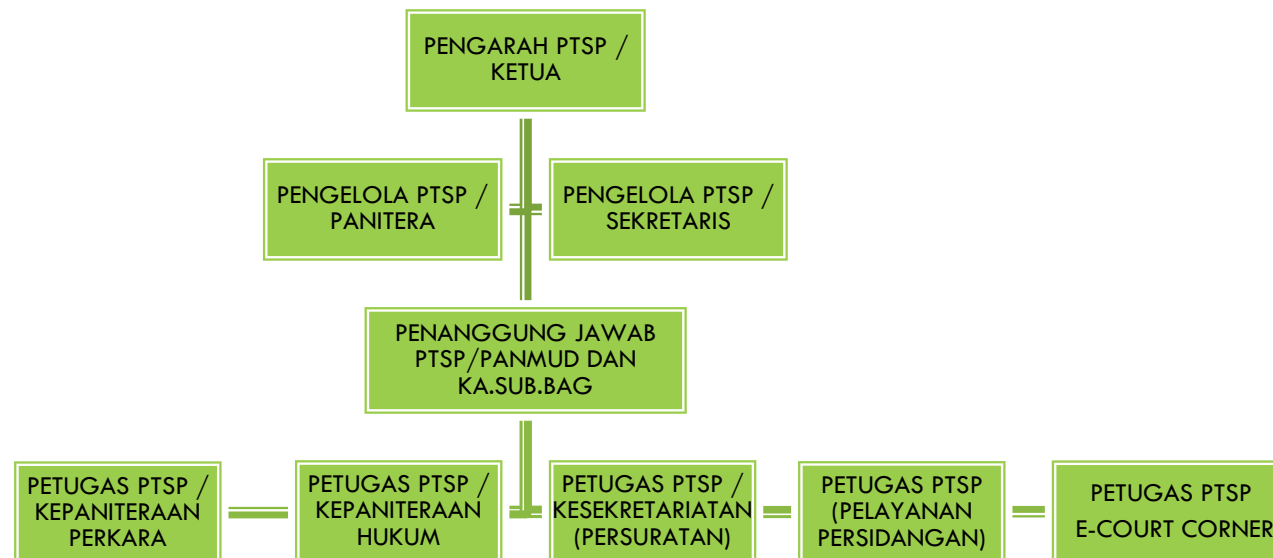
1. Senin s.d. Kamis : Pukul 08.30 s.d. 15.00 WIB
2. Jumat : Pukul 08.30 s.d. 15.30 WIB

III. PENGATURAN MEJA PTSP SEBAGAI BERIKUT :

1. Meja PTSP ditempatkan pada loby yang menghadap pintu masuk, namun jika tidak memungkinkan agar disesuaikan dengan kondisi ruang Pengadilan, yang dilengkapi kursi-kursi untuk pemohon.
2. Bentuk dan ukuran meja PTSP harus memudahkan pemberian layanan bagi pemohon, termasuk penyandang disabilitas.
3. Di atas meja PTSP harus tersedia komputer, formulir pengaduan dan buku regisiter pengaduan, formulir dan buku register permohonan informasi, dan brosur yang berisi tentang layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.
4. Tulisan PTSP dipasang di dinding belakang/backdrop PTSP.
5. Panjang meja PTSP disesuaikan dengan jumlah layanan Kepaniteraan dan Bagian/Sub Bagian pada Kesekretariatan yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
6. Pada setiap ruangan layanan agar disediakan kursi untuk pengunjung/pengguna Layanan PTSP yang mengantre atau menunggu.



STRUKTUR ORGANISASI PTSP PENGADILAN TATA USAHA NEGARA





KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : W2.TUN.1/1867 a /HM.02.3/VII/2023

TENTANG

PERUBAHAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa transparansi dan pelayanan publik merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan Badan Peradilan dibawahnya;
- b. Bahwa untuk memberikan pelayanan publik secara baik dan memberikan informasi secara transparansi, maka perlu dibentuk Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/II/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
10. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
11. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 462/DJMT/KEP/8/2018, tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA;

Pertama : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Kedua : Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Petugas Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan setiap kegiatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Pejabat lainnya yang terkait;

Ketiga : Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya;

SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 31 Juli 2023.



GOENEN PRATIWI, S.H., M.H.
NIP. 19721026 199203 2 001

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : W2.TUN.1/18679/HM.02.3/VII/2023
Tanggal : 31 Juli 2023.

PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM PTSP
1	OENOE PRATIWI, S.H., M.H.	KETUA	PENGARAH PTSP
2	JOKO SETIONO, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KOORDINATOR PTSP
3	MUHAMMAD, S.H., M.H.	PANITERA	PEJABAT PENGELOLA PTSP
4	ONO HARYONO, S.E.	SEKRETARIS	
5	Hj. ROMLAH, S.H., M.H.	PANITERA MUDA HUKUM	PENANGGUNGJAWAB PTSP
6	SRI HARTANTO, S.H., M.Kn.	PANITERA MUDA PERKARA	
7	MILATUL KHANIFAH, S.H.	KA.SUB.BAG.KEPEGAWAIAN, ORTALAK	
8	TIAS DESCARIASY, S.H.	KA.SUB.BAG.PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN	
9	IKA SALAHUDDIN, S.E.	KA.SUB.BAG.UMUM DAN KEUANGAN	
10	DWI GUSTIANI FAZSAH, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	KASIR
11	KORNELIUS, S.E., S.H.	PANITERA PENGGANTI	MEJA PENYERAHAN DOKUMEN
12	EDWIN BATHZEBA, A.Md.	PENGELOLA PERKARA	
13	LUDDIMIN, S.H.	PRANATA KEARSIPAN	PETUGAS TATA KELOLA PERSURATAN
14	HARRY MARANGKUP TUA, S.Sos.	PENGELOLA PERKARA	PETUGAS PELAYANAN PERSIDANGAN, MEJA INFORMASI, PELAYANAN HUKUM DAN PENGADUAN
15	PURWOYO, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	
16	BAGUS NURHADI WIDJOYO	JURUSITA PENGGANTI	PETUGAS E-COURT CORNER
17	ANDREW JONATHAN TARIGAN, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	MEJA PENERIMAAN DOKUMEN (GUGATAN, PERMOHONAN, BANDING, KASASI, PK, EKSEKUSI DAN SURAT KUASA)

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 31 Juli 2023.



OENOE PRATIWI, S.H., M.H.
NIP. 19721026 199203 2 001

C. Inovasi Pelayanan Publik

Modernisasi peradilan melalui inovasi teknologi informasi merupakan kontribusi lembaga peradilan untuk menjalankan mandat dalam rangka mendukung kemudahan berusaha (*Esay of Doing Business*). Bahwa aparaturnya peradilan tidak hanya dituntut penguasaan ilmu hukum tetapi juga harus menguasai teknologi informasi, dan merubah paradigma pelayanan *one to one* menjadi *one to many*. PTUN Jakarta sebagai peradilan modern berbasis teknologi informasi dapat terwujud apabila terlebih dahulu membangun perangkatnya baik SDM nya maupun infrastrukturnya.

Proses pemeriksaan perkara terlambat maka proses pemberian rasa keadilan akan terhambat, sehingga tidak tercapai asas berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan. Semua dapat tercapai apabila saling bekerjasama, apabila bekerja sendiri-sendiri maka pelaksanaan tugas dan fungsi tidak akan maksimal. Oleh karena itu, PTUN Jakarta membuat inovasi yaitu **SI PITUNG (Sistim Pelayanan Informasi Terpadu Unggulan)**, *new e-visitor* (buku tamu), dan *e-case files versi 2* (aplikasi arsip perkara elektronik) berbasis Teknologi Informasi (TI).

Berikut inovasi yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

1. Aplikasi SI PITUNG versi 2 (Sistim Pelayanan Informasi Terpadu Unggulan)

PTUN Jakarta sebagai peradilan modern berbasis teknologi informasi pada awalnya belum memiliki aplikasi pelayanan chatbot Whatsapp sebagai Informasi pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat terkait persidangan. PTUN Jakarta melakukan inovasi berbasis teknologi informasi dengan optimalisasi media informasi dan pelayanan secara digital melalui pengembangan aplikasi layanan chatbot Whatsapp yang terintegrasi dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

PTUN Jakarta membuat suatu inovasi berbasis teknologi informasi media informasi digital berupa aplikasi pelayanan chatbot Whatsapp yang diberi nama **Aplikasi SI PITUNG (Sistim Pelayanan Informasi Terpadu Unggulan)**.

Chatbot adalah software Artificial Intelligence (AI) yang dapat melakukan percakapan dengan pengguna dalam bahasa yang natural melalui aplikasi pesan, website, atau aplikasi mobile. Natural di sini maksudnya adalah kita seolah-olah bukan berbicara kepada robot atau sistem, melainkan seperti dengan admin CS pada umumnya. WhatsApp adalah aplikasi pengiriman pesan instan yang memungkinkan untuk berbagi tidak hanya pesan teks tetapi juga pesan multimedia seperti foto dan video melalui koneksi internet yang banyak digunakan di seluruh dunia dan paling populer dibandingkan aplikasi pengirim pesan lainnya.

Inovasi **aplikasi SI PITUNG versi 2 (Sistim Pelayanan Informasi Terpadu Unggulan)** penerapannya di PTUN Jakarta merupakan pengembangan dari aplikasi chatbot Whatsapp yang terintegrasi dengan SIPP. Aplikasi Chatbot Whatsapp tersebut sepenuhnya optimal dalam memberikan informasi terkait perkara yang disidangkan di PTUN Jakarta kepada masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang cepat, valid dan dapat dipercaya terutama bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari PTUN Jakarta. Informasi layanan secara digital diperlukan sehingga optimalisasi aplikasi layanan chatbot Whatsapp dengan melakukan pengembangan baik dalam responsibilitas, publikasi dan data informasi.

Berikut tampilan inovasi **Aplikasi SI PITUNG (Sistim Pelayanan Informasi Terpadu Unggulan)**.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
SI-PITUNG
 Sistim pelayanan Informasi Terpadu unggulan



Tahu Kah Anda

Dapatkan informasi cepat terkait info persidangan anda

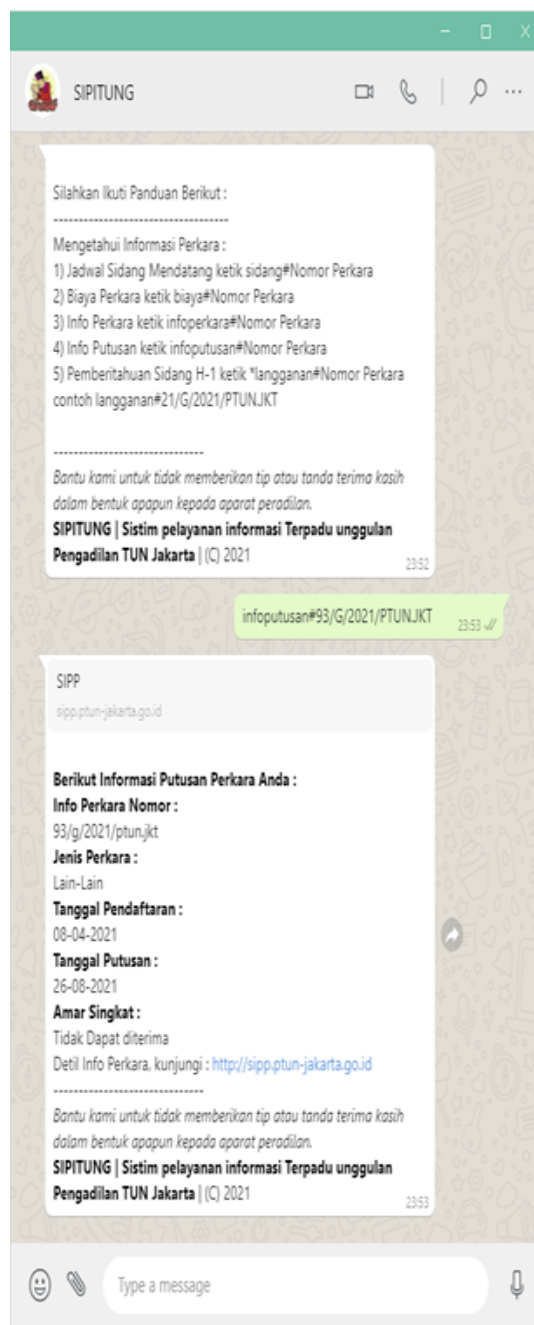
 **Hubungi kami**
0882-9994-9929

Layanan ini gratis

Ayo.. Segera gunakan Aplikasi SI-PITUNG

Untuk Mengetahui Informasi Perkara :

- 1) Jadwal Sidang Mendatang ketik sidang#Nomor Perkara
- 2) Biaya Perkara ketik biaya#Nomor Perkara
- 3) Info Perkara ketik infoperkara#Nomor Perkara
- 4) Info Putusan ketik infoputusan#Nomor Perkara
- 5) Pemberitahuan Sidang H-1 ketik *langganan#Nomor Perkara contoh langganan#21/G/2021/PTUN.JKT



SIPITUNG

Silahkan ikuti Panduan Berikut :

Mengetahui Informasi Perkara :

- 1) Jadwal Sidang Mendatang ketik sidang#Nomor Perkara
- 2) Biaya Perkara ketik biaya#Nomor Perkara
- 3) Info Perkara ketik infoperkara#Nomor Perkara
- 4) Info Putusan ketik infoputusan#Nomor Perkara
- 5) Pemberitahuan Sidang H-1 ketik *langganan#Nomor Perkara contoh langganan#21/G/2021/PTUN.JKT

Bantu kami untuk tidak memberikan tip atau tanda terima kasih dalam bentuk apapun kepada aparat peradilan.
SIPITUNG | Sistim pelayanan informasi Terpadu unggulan Pengadilan TUN Jakarta | (C) 2021

infoputusan#93/G/2021/PTUN.JKT

SIPP
 sipp.ptun-jakarta.go.id

Berikut Informasi Putusan Perkara Anda :

Info Perkara Nomor :
 93/g/2021/ptun,jkt

Jenis Perkara :
 Lain-Lain

Tanggal Pendaftaran :
 08-04-2021

Tanggal Putusan :
 26-08-2021

Amar Singkat :
 Tidak Dapat diterima

Detil Info Perkara, kunjungi : <http://sipp.ptun-jakarta.go.id>

Bantu kami untuk tidak memberikan tip atau tanda terima kasih dalam bentuk apapun kepada aparat peradilan.
SIPITUNG | Sistim pelayanan informasi Terpadu unggulan Pengadilan TUN Jakarta | (C) 2021

2. *New e-visitor* versi 2 (Buku Tamu)

Inovasi PTUN Jakarta sebagai peradilan modern berbasis teknologi informasi yang kedua selanjutnya diberi nama *new e-visitor* (buku tamu). PTUN Jakarta pada awalnya sudah memiliki aplikasi *e-visitor* (buku tamu) sebagai Informasi pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat terkait persidangan. PTUN Jakarta selanjutnya melakukan inovasi dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan manajemen pelayanan pada pengadilan sangat dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan bermutu.

PTUN Jakarta dengan inovasinya melakukan pengembangan dari inovasi aplikasi *e-visitor* telah diperbaharui menjadi *new e-visitor* (buku tamu) sehingga dapat mencakup kebutuhan manajemen pelayanan buku tamu yang terintegrasi dengan layanan PTSP dan persidangan. Inovasi *new e-visitor* (buku tamu) mendukung inovasi yang sudah ada sebelumnya yaitu inovasi aplikasi *e-visitor*. Inovasi *new e-visitor* (buku tamu) mendukung inovasi yang sudah ada sebelumnya dan terintegrasi dengan layanan PTSP dan SIPP persidangan.

Inovasi *new e-visitor* (buku tamu) penerapannya di PTUN Jakarta merupakan pengembangan dari aplikasi *e-visitor* (buku tamu) yang terintegrasi dengan layanan PTSP dan SIPP persidangan. Aplikasi *new e-visitor* (buku tamu) merupakan instrumen/alat bantu yang diperlukan dalam menunjang kinerja PTUN Jakarta untuk lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Dengan menggunakan fitur barcode masyarakat bisa menggunakan smartphome dapat memilih bentuk layanan yang diinginkan.

Berikut tampilan inovasi Aplikasi *New e-visitor* (Buku Tamu).

Tampilan absensi kehadiran para pihak



Kehadiran pihak yang sudah lengkap

Barcode Absensi



Persidangan yang sedang berlangsung

DETAIL KEHADIRAN PIHAK

Nomor Perkara	150/G/2021/PTUN.JKT
Agenda	Bukti Surat para pihak dan Duplik Tergugat (kesempatan terakhir)
Tanggal dan Jam Persidangan	09-09-2021 - 10:00 WIB
Ruang Sidang	Kartika





Daftar Para Pihak

NO	NAMA PIHAK	STATUS PIHAK	STATUS KEHADIRAN
1	DPP PARTAI DEMOKRAT	Penggugat	<input checked="" type="checkbox"/>
2	BOHMAN FAHROJH	Pengacara Penggugat	<input checked="" type="checkbox"/>
3	MENTERI HUKUM DAN HAM	Tergugat	<input checked="" type="checkbox"/>

[← Kembali](#)

Monitoring Persidangan

Monitoring Persidangan > [List Monitoring Persidangan](#)

 150/G/2021/PTUN.JKT R. Kartika	 RUANG SIDANG KOSONG R. Chandra	 RUANG SIDANG KOSONG R. Cakra	 RUANG SIDANG KOSONG R. Triha
 RUANG SIDANG KOSONG R. Sari			

ANTRIAN PERSIDANGAN

NO.	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK	STATUS	AKSI
1	150/G/2021/PTUN.JKT	Penggugat: DPP PARTAI DEMOKRAT Tergugat: MENTERI HUKUM DAN HAM	Siaga	 

Buku Tamu Pelayanan

DETIL KEHADIRAN PIHAK

Nomor Perkara: 150/G/2021/PTUN.JKT

Agenda: Bukti Surat para pihak dan Duplik Tergugat (kesempatan terakhir)

Tanggal dan Jam Persidangan: 09-09-2021 - 10:00 WIB

Ruang Sidang: Kartika

Daftar Para Pihak

NO	NAMA PIHAK	STATUS PIHAK	STATUS KEHADIRAN
1	DPP PARTAI DEMOKRAT	Penggugat	<input checked="" type="checkbox"/>
2	IKHWAN FAHROJIH	Pengacara Penggugat	<input checked="" type="checkbox"/>
3	MENTERI HUKUM DAN HAM	Tergugat	<input checked="" type="checkbox"/>

[← Kembali](#)

Superadmin

Tamu Non Persidangan

Tamu Non Persidangan | [List Tamu Non Persidangan](#)

LIST TAMU NON PERSIDANGAN

Mulai Tanggal: Sampai Tanggal: [Cari](#) [Cetak](#) [Tampil Semua](#)

ID	NO	NAMA	PEKERJAAN	KEPERLUAN	FILE KTP	STATUS	TANGGAL MASUK	AKSI
	1	Asrul	PNS	Kunjungan Kerja (Binas)			09-Sep-2021	

Page 1 of 1

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ©2021

3. Aplikasi Jak Aksi

Jak Aksi adalah aplikasi resmi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang digunakan untuk memudahkan masyarakat untuk mengajukan permohonan eksekusi dan memonitoring jalannya proses eksekusi.

Aplikasi Jak – Aksi adalah inovasi terbaru Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. pada hari Jumat, 23 Juni 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menggelar Acara Launching Aplikasi Jak – Aksi Versi 1 (Aplikasi Eksekusi PTUN Jakarta). Acara ini di hadiri oleh YM. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H (Hakim Agung Kamar TUN), Dr. H. Hari Sugiharto, S.H. M.H. (Direktur Binaanismin Dil TUN), H. Oyo Sunaryo,S.H., M.H (KPT TUN Jakarta).

PTUN JAKARTA

Jak Aksi

Jak Aksi adalah aplikasi resmi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang digunakan untuk memudahkan masyarakat untuk mengajukan permohonan eksekusi dan memonitoring jalannya proses eksekusi.

[Daftar](#)

JAK AKSI

admin web Administrator

Beranda / Daftar Eksekusi

Silahkan gunakan hasil tabel database dibawah ini untuk melakukan navigasi atau filter hasil pencarian.

Tampilkan Cari

#	Nomor Permohonan Eksekusi Online & Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran Eksekusi	Nama Pemohon	Tahapan	Status	Aksi
1	PTUN.JKT-231294003 Nomor Perkara : 355/G/TF /2022/PTUN.JKT	21 Desember 2023	DinaAstid Carolina (Prinsipal)	Pendaftaran	Menunggu Pembayaran	Aksi -
2	PTUN.JKT-231243002 Nomor Perkara : 600/G/SPPU /2023/PTUN.JKT	21 Desember 2023	Zul Fahmi (Kuasa Hukum)	Pendaftaran	Pembayaran Sudah Diterima	Aksi -
3	PTUN.JKT-231293001 Nomor Perkara : 107/G/2022/PTUN.JKT	14 Desember 2023	MUHAMMAD SALEH GASIN, S.H., M.H. (Kuasa Hukum)	Pendaftaran	Pembayaran Sudah Diterima	Aksi -

Menampilkan 3 sampai 3 dari total 3 data

Sebelumnya **1** Berikutnya

© Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta - 2024 Aplikasi Jak Aksi v1.0.0

Survey IKM

Survei IKM

Survei IKM > List Survei IKM

LIST SURVEI IKM

10

NO	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JENIS LAYANAN	AKSI
1	Laki - Laki	22	S3	PMS	Pelayanan PTSP	  

Page 1 of 1

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta #10071







Survey IPAK

Survei IPAK

Survei IPAK > Survei IPAK

LIST SURVEI IPAK

ID

NO	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JENIS LAYANAN	AKSI
1	Laki - Laki	25	S3	Aduwan	Kawling	  
2	Perempuan	18	S3	PNS	Pelayanan PTSP	  

Page 1 of 1

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta #10071

BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pelaksanaan Pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dilakukan dalam dua (2) hal, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : W2.TUN.1/1989 /PS.00/VIII/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang** :
- a. Bahwa guna melaksanakan tugas dan kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta baik di bidang teknis administrasi peradilan (Kepaniteraan) maupun di bidang teknis administrasi Umum (Kesekretariatan), maka perlu ditunjuk Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang;
 - b. Bahwa oleh karena adanya Hakim yang Promosi dan Mutasi dipandang perlu melakukan pergantian personel Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang;
 - c. Bahwa Hakim yang namanya ditunjuk dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan;
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006, tanggal 19 Oktober 2006, tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015, tanggal 7 Oktober 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 6. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 907/SEK/KP.01.2/6/2020, tanggal 8 Juni 2020, tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KOORDINATOR DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA;
- Pertama : Menunjuk Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Hakim Pengawas Bidang bertugas melakukan semua pengawasan sesuai Tupoksi bidang tersebut, dan juga memberikan bimbingan dan petunjuk yang diperlukan kepada para Pejabat Struktural dan Fungsional serta petugas-petugas terkait lainnya sesuai Tupoksi masing-masing;
- Ketiga : Hakim Pengawas Bidang melaksanakan tugas pengawasan **setiap bulan** dengan penuh tanggung jawab dan melaporkannya setiap tanggal 5 pada bulan tersebut secara reguler dan tertulis kepada Koordinator Hakim Pengawas Bidang;
- Keempat : Koordinator Hakim Pengawas Bidang bertugas memberi bimbingan dan petunjuk yang diperlukan kepada para Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Tupoksi masing-masing, juga membuat laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan para Hakim Pengawas Bidang;
- Kelima : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang penunjukan Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;
- SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada para Hakim yang ditunjuk untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 9 Agustus 2023.



OENGEN PRATIWI, S.H., M.H.
NIP. 19721026 199203 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 NOMOR : W2.TUN.1/1984/PS.00/VIII/2023.
 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2023.

**DAFTAR NAMA KOORDINATOR DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
 KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN
 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	DITUNJUK SEBAGAI
1	JOKO SETIONO, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KOORDINATOR PENGAWAS BIDANG

I. HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN			
1	HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.	HAKIM	KEUANGAN PERKARA
2	DIKDIK SOMANTRI, S.H., M.H.	HAKIM	PENINJAJIAN KEMBALI
3	LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum	HAKIM	SURAT KUASA
4	Dr.NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.	HAKIM	BUKU REGISTER
5	GANDA KURNIAWAN, S.H.	HAKIM	PERKARA BANDING
6	SAHIBUR RASID, S.H., M.H.	HAKIM	PERKARA KASASI
7	RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.	HAKIM	LAPORAN PERKARA
8	FAISAL ZAD, S.H., M.H.	HAKIM	SIPP
9	FILDY, S.H., M.H.	HAKIM	INFORMASI DAN PENGADUAN, WBS, GRATIFIKASI, SERTA BENTURAN KEPENTINGAN
10	HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.	HAKIM	BERKAS IN AKTIF
11	ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.	HAKIM	POSBAKUM
12	IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.	HAKIM	EKSEKUSI
13	FERRINA PERMADI, S.H.	HAKIM	PTSP

II. HAKIM PENGAWAS BIDANG KESEKRETARIATAN			
1	OKTOVA PRIMASARI, S.H.	HAKIM	KEBERSIHAN
2	DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.	HAKIM	KEAMANAN
3	ARIFUDDIN, S.H., M.H.	HAKIM	PERLENGKAPAN & INVENTARISIR
4	NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H.	HAKIM	PERPUSTAKAAN & PERSURATAN
5	YUSTAN ABITHOYIB, S.H.	HAKIM	KEUANGAN
6	FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.	HAKIM	KEPEGAWAIAN & ORTALA
7	ANDI MADERUMPU, S.H., M.H.	HAKIM	PELAPORAN
8	MOHAMMAD HERRY INDRAWAN PATIRADJA, S.Soc., S.H., M.H.	HAKIM	PERENCANAAN
9	ANDI FAHMI AZIS, S.H.	HAKIM	IT (WEBSITE)

Ditetapkan di : Jakarta.
 Pada Tanggal : 9 Agustus 2023.



Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut diatas, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerbitkan Keputusan nomor : W2.TUN1/1984/PS.00/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Pengawasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan meliputi :

1. Pelaksanaan Tugas Pokok di Lingkungan Kepaniteraan yang mencakup Administrasi persidangan dan Administrasi perkara.
2. Pelaksanaan Tugas Pokok di lingkungan kesekretariatan mencakup administrasi kepegawaian, Keuangan, inventaris, pelaporan, IT, dan administrasi lainnya.
3. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang.
4. Penunjukan Hakim Pengawas Bidang bagi Sub Kepaniteraan Hukum Perkara, Sub Kepaniteraan Hukum, Sub Bag Umum dan Keuangan, Sub Bag Kepegawaian dan Ortala, serta Sub Bag Perencanaan , TI dan Pelaporan (PTIP).
5. Pengawasan berkala berupa permintaan laporan bulanan kepada masing-masing sub bagian oleh Hakim Pengawas Bidang disertai tindak lanjut hasil pengawasan.
6. Hasil pengawasan dilaporkan oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 1 (Satu) Bulan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Koordinator Hakim Pengawas Bidang.

Pengawasan yang dimaksud untuk, memperoleh informasi apakah penyelenggara teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan program kerja dapat terlaksana sesuai rencana.

B. EVALUASI

Dalam suatu Lembaga Pemerintah yang transparansi maka harus selalu diadakan evaluasi secara internal, baik di bagian kepaniteraan maupun dibagian kesekretariatan. Pelaksanaan tugas administrasi umum secara garis besar sudah berjalan baik dan tertib meskipun masih ada kekurangan, bahwa untuk meminimalisir temuan dan kekurangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Hakim Pengawas Bidang harus mengevaluasi masing-masing bidang atau bagian (Kepaniteraan dan Kesekretariatan) secara berkala, dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan persidangan secara elektronik (e-court) dan melakukan Inovasi dengan baik, hal itu harus lebih dikembangkan lagi, dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai dan Sumber Daya Manusia yang ada dimaksimalkan dengan baik.

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mendukung pemerintahan yang baik. Untuk itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan harapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan penyusunan laporan tahunan di tahun 2023 dengan harapan institusi lain dan masyarakat dapat lebih mengetahui berbagai persoalan kinerja dan kendala yang dihadapi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sangat kompleks di lapangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melaksanakan kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung meliputi implementasi program unggulan yaitu SIPP, layanan PTSP, proses perkara secara elektronik (E-Court), kepatuhan terhadap LHKPN dan Mendukung Pembangunan Zona Integritas. Meskipun tugas administrasi perkara dan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah berjalan dengan baik dan tertib namun secara rutin pembinaan dan pengawasan tetap dilaksanakan untuk dapat meningkatkan prestasi kerja.

Prestasi yang telah dicapai saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendapat predikat juara ke 2 untuk Pendaftaran Gugatan Melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), juara ke 3 lomba Video Profile yang di selenggarakan Ditjenbadilmitun ditahun 2022, serta mendapatkan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Mahakamah Agung RI dengan Predikat B. Dengan prestasi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat memberikan pelayanan

yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan informasi dan pelayanan di Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Telah mengoptimalkannya penggunaan system informasi teknologi informasi,, Portal Info Perkara dan saat ini telah di kembangkan Aplikasi yang bernama SI-PITUNG (Sistem Pelayanan Infomasi Terpadu Unggulan), New E-Visitor Book (Buku Tamu Elektronik) serta E-Case Files Versi 2 (Aplikasi Arsip Perkara Elektronik). Dengan adanya inovasi tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bisa lebih memaksimalkan pelayanan kepada para pihak yang beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Visi dan Misi yakni terwujudnya Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan Dan Transparan Yang Berbasis Teknologi Informasi.

Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam hal memberikan pelayanan publik melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berpredikat “Baik” dan sistem teknologi informasi, SIPP dan pelayanan dalam bentuk manual merupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sekalipun tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pelaksanaan realisasi anggarannya dioptimalkan sebagai upaya peningkatan produktifitas kinerja yang meliputi bidang kesekretariatan dan kepaniteraan. Penggunaan anggaran untuk biaya-biaya/belanja pegawai, barang dan modal semakin efektif dan efisien, tepat cara dan sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dalam posisi keuangan DIPA tahun 2023 ; keseimbangan RKA-KL, pelaksanaan dan sisa anggaran yang dianalisis secara rasio dan akuntable.

B. REKOMENDASI

Pada akhir laporan ini, kami sampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk mengisi bagian-bagian di sekretariat yang banyak di isi oleh honorer ;
2. Perlu adanya penambahan kendaraan dinas roda 4 bagi pimpinan ;
3. Perlu adanya penambahan Biaya untuk renovasi pembangunan rumah dinas Ketua, Wakil ketua dan Hakim yang saat ini dalam koondisi rusak berat dan tidak layak untuk di tempati;
4. Perlu adanya peremajaan alat bantu kerja seperti PC, Laptop, printer dan scanner dalam menunjang teknologi informasi;
5. Perlu adanya penambahan tenaga outsourcing untuk kebersihan, keamanan, dan supir pimpinan.

Dengan adanya penambahan pegawai serta peningkatan kualitas sarana dan prasana dapat lebih menunjang penyelesaian tugas dan fungsi PTUN Jakarta menjadi lebih optimal.